

**DAMPAK PERIJINAN ALIH FUNGSI HUTAN TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT PEDALAMAN KABUPATEN
PASER KALIMANTAN TIMUR**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Dengan Peminatan Governace dan Transisi**

**Oleh:
D.Maswara
NIM.125120507111032**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

**DAMPAK ALIH FUNGSI HUTAN TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT ADAT PEDALAMAN KABUPATEN PASER
KALIMANTAN TIMUR**

SKRIPSI

Disusun oleh :

D.Maswara

NIM. 125120507111032

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Mar'atul Makhmudah., S.IP., M.Si

H. B. Habibi Subandi, S.Sos, MA

NIP. 80080311120410

NIP. 2013048409051001

**DAMPAK PERIJINAN ALIH FUNGSI HUTAN TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT PEDALAMAN KABUPATEN
PASER KALIMANTAN TIMUR**

SKRIPSI

Oleh :

D.Maswara

NIM. 125120507111032

Tim Penguji :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Mar'atul Makhmudah., S.IP., M.Si
NIP. 80080311120410

H. B. Habibi Subandi, S.Sos, MA
NIP. 2013048409051001

Anggota Sidang

Anggota Sidang

Dr. HilmyMochtar, MS
NIP.195201011982031006

Taufik Akbar, S.IP., M.IP
NIP. 20140585110411001

Dekan FISIP UniversitasBrawijaya

Prof. Dr. Unti Ludigdo
NIP. 19690814 199402 1001

PERNYATAAN

D.Maswara

NIM. 125120507111032

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul **Dampak Perijinan Alih Fungsi Hutan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Adat Pedalaman Kabupaten Paser Kalimantan Timur** adalah benar – benar karya sendiri. Hal – hal yang buaka karya saya diberi citasi dan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 24 April 2016

Yang membuat pernyataan

D.Maswara

NIM. 125120507111032

ABSTRAK

D. Maswara. Dampak Perijinan Alih Fungsi Hutan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Adat Pedalaman Kabupaten Paser Kalimantan Timur (Dibimbing oleh Mar'atul Makhmudah., S.IP., M.Si dan H. B. Habibi Subandi, S.Sos, MA)

Penelitian ini didasarkan dari banyaknya hutan yang beralih fungsi menjadi perkebunan dan pertambangan. Oleh karena itu fokus penelitian ini membahas tentang dampak alih fungsi hutan terhadap kesejahteraan masyarakat adat pedalaman. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Paser Belengkong dan Kecamatan Muara Komam dan penelitian terfokus di Desa Perepat, Desa Laburan, Desa Sunge Batu dan Desa Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang memiliki tujuan penelitian, maka penelitian dalam meneliti permasalahan dampak alih fungsi hutan Terhadap kesejahteraan masyarakat ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitiannya meliputi Dinas yang terkait Dinas Pertanahan, Kepala Desa, Perusahaan Swasta, Kepala Adat/Suku dan informan tambahan Masyarakat terkena dampak akibat alih fungsi hutan. Prosedur pengambilan data menggunakan metode penelitian kualitatif penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data digunakan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, Penelitian ini juga menggunakan penjabaran secara deskriptif, yang intensif, terperinci, dan mendalam dalam mencari sumber data yang ada, mengenai alih fungsi hutan terhadap kesejahteraan masyarakat pedalaman subjek yang menjadi bahan penelitian menggunakan pendekatan ekonomi politik dan ekologi politik yang berlokasi di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut: Alih fungsi hutan memberi tahu kita bahwa sangat luar biasa hasil kekayaan alam yang terdapat di kabupaten paser. Setelah terjadi alih fungsi mengakibatkan hilangnya ekosistem flora dan fauna endemik Kalimantan kabupaten paser. Memudarnya kearifan lokal, hilangnya pohon – pohon besar sebagai penyuplai oksigen dunia. Berubahnya pola kehidupan masyarakat pedalaman kabupaten paser. Di sisi lain alih fungsi hutan memberikan dampak yang luar biasa pada pendapatan daerah. Secara ekonomi pendapatan daerah menjadi luarbiasa akibat alih fungsi hutan, menjadi perkebunan dan pertambangan. Setelah Penelitian ini berlangsung banyak akibat aktifitas pertambangan hilangnya tanah lapisan atas menyebabkan kegersangan, kekeringan dan lapisan tanah bawah naik kepermukaan yang terdapat kandungan kandungan merkuri, sulfur dan zat asam tanah mengalir ke aliran sungai penduduk. Tanpa ada pertanggung jawaban dari pihak perusahaan haruslah ada kontrol dari pemerintah untuk kebaikan keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

ABSTRACT

D. Maswara. The Impact of Forest Conversion Permits for The Welfare of Indigenous Peoples Inland Paser Counties East Kalimantan (Guided by Mar'atul Makhmudah., S.IP., M.Si and H. B. Habibi Subandi, S.Sos, MA)

The study is based on the number of forest converted to plantations and pertambangan. Oleh therefore the focus of this study discusses the impact of forest conversion terhadap welfare of indigenous communities inland. This research was conducted in the District Paser Belengkong and Muara Komam and research focused on the village of Perepat, Village laburan, Village Sunge Stone and Muara Komam, Paser, East Kalimantan, which has the purpose of research, the research work in researching issues impact forest conversion against welfare this community uses descriptive qualitative research, case study approach. The research object associated meliputi Dinas Land Agency, the Village Head, Private Companies, Head of Indigenous / Tribal Peoples and additional informants affected by forest conversion. file collection procedures menggunakan metode qualitative research Qualitative research is a method penelitian used to examine the condition of natural objects, where the researcher as instrument keys, data collection techniques are used in combination, the data analysis is inductive, this research also uses translation descriptively, intensive, detailed and in-depth search for existing data sources, the conversion of forests to the welfare of rural communities who become the subject of research approach political economy and political ecology, located in Paser, East Kalimantan. From this research obtained the following results: Transfer function tells us that the forest is extraordinary the natural wealth found in the district darts. After going over the ecosystem resulting in the loss of flora and fauna endemic to Borneo county darts. Waning local wisdom, the loss of trees - big trees as the world's oxygen supply. The changing pattern of life of the rural community districts darts. On the other side of the forest conversion gives a tremendous impact on local revenues. Economically area becomes extraordinary income due to the transfer functions of forests, plantations and mining. The study took place after a lot of mining activity due to the loss of topsoil causes aridity, drought and subsoil surfaced that there is the content of mercury, sulfur and acid soil flowing into the river population. Without any liability of the company shall be no control of the government for the good of the sustainability of the environment and people's lives.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal dan sesuai rencana. Skripsi ini berjudul **“Dampak Ali Fungs iHutan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Adat Pedalaman Kabupaten Paser Kalimantan Timur”** merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Proses penulisan ini telah memberikan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis tentang arti *“Kehidupan, Tantangan, cobaan, Perjuangan dan Kesabaran semua ini adalah jalan kesuksesan”* yang selalu menghampiri penulis disetiap tahapan penulisan ini.

Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Mardi yang sangat memberikan semangat dan informasi dan Ibunda tercinta Nurul Hidayah dan keduasaudara tersayang D.Ratya Puspa, D.Renita Puspa, dan keluarga besar yang selalu memberikan

dukungan moral dan semangat untuk selalu menjadi lebih baik untuk menuju jalan kesuksesan.

2. Ibu Mar'atulMakhmudah., S.IP., M.Si selaku sekretaris Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya dan juga sebagai Dosen yang selalu memberikan semangat, membantu memperjelas segala kesusahan penelitian dan kelancaran pembuatan skripsi.
3. Bapak H. B. Habibi Subandi, S.Sos, MA selaku Dosen Pembimbing selama melaksanakan proses Pembuatan Penelitian dan penulisan skripsi.
4. Seluruh dosen pengajar Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang selalu membina dan mentransfer ilmu kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penyelesaian studi dan telah memberikan kontribusi ilmu dalam menambah wawasan, cara berfikir yang dapat dijadikan bekal dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Triana amalina atika trimakasih sudah memberikan semangat, Iszmi akbar, Heru dwi januar, Jefri sumarta, tito delfi cristiantoro, dafiq, giska candra, tia, amel, yosi damara, dan kawan kawan terbaik peneliti, yang selalu memberikan semangat selama penelitian berlangsung saya ucapkan Trimakasih Banyak.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Desa Laburan, Kepala Desa Perepat, dan desa desa yang peneliti kunjungi di Tana Paser dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah

membantu selama melaksanakan yang melaksanakan penelitian untuk karya tulis skripsi ini.

7. Semua teman, rekan, maupun pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu peneliti ucapkan trimakasih.
8. Senior-senior, adik-adik serta rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya atas suasana kekeluargaan dan kebersamaan yang telah tercipta selama mengikuti perkuliahan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisan menyajikannya tidak lain karena keterbatasan peneliti, sehingga demi menyempurnakannya peneliti mohon adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Akhirnya dalam doa penulis bermohon semoga semua bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Pengasih,

Malang, 15 Juni 2015

PENELITI

DAFTAR ISI

DAMPAK ALIH FUNGSI HUTAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT PEDALAMAN KABUPATEN PASER KALIMANTAN TIMUR.....	i
DAMPAK ALIH FUNGSI HUTAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT PEDALAMAN KABUPATEN PASER KALIMANTAN TIMUR.....	ii
DAMPAK ALIH FUNGSI HUTAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT PEDALAMAN KABUPATEN PASER KALIMANTAN TIMUR.....	iii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
Lampiran 1 : Surat Keterangan penelitian	xvi
Lampiran 2 : Surat Keterangan penelitian	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Teoritik	10
2.1.1 Ekonomi Politik	10
2.2 Tinjauan Konseptual.....	13
2.2.1 Konsep Alih Fungsi Hutan.....	13
2.2.2 Konsep Masyarakat Adat Pedalaman	19
2.2.3 Konsep Ekologi Politik.....	21
2.2.4 Konsep Welfare State	24
2.5 Penelitian Terdahulu.....	26
2.6 Kerangka Pemikiran	29
BAB III.....	33
3.1 Metode Penelitian	33
3.2 Lokasi Penelitian	35
3.3 Fokus Penelitian	36
3.4 Sumber Data	37
3.4.1 Sumber Data Primer.....	37

3.4.2	Sumber Data Sekunder	41
3.5	Teknik Penentuan Informan	41
3.5.1	Akses dan Hubungan dengan Informan	42
3.6	Teknik Pengumpulan Data	43
3.6.1	Wawancara Mendalam (<i>Depth Interview</i>)	43
3.6.2	Observasi	45
3.6.3	Dokumentasi	46
3.7	Teknik Analisis Data	46
3.8	Triangulasi Data	48
GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN		49
4.1	Gambaran Umum	49
4.1.1	Profil Hutan Dan Alih Fungsi Hutan Di Kabupaten Paser	49
4.1.2	Profil Masyarakat Adat Pedalaman Sebelum dan Sesudah Alih Fungsi Hutan di Kecamatan Paser Belengkong dan Kecamatan Muara Komam.....	59
4.2	Kondisi Ekonomi Kabupaten Paser Kecamatan paser Belengkong dan Kecamatan Muara Komam	68
4.2.1	Kondisi Pendidikan	74
4.2.2	Kondisi Pola Hidup.....	74
4.2.3	Kondisi Lingkungan.....	76
4.3	Dampak Alih fungsi Hutan Menjadi Perkebunan dan Pertambangan...80	
4.3.1	Dampak Ekonomi	81
4.3.2	Pola Hidup	82
4.3.3	Dampak Lingkungan.....	84
4.4	Peran Pemerintah dan Sektor Swasta	87
4.4.1	Peran Pemerintah	87
4.5	Data Badan Pusat Statistik Mengenai Tingkat Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Paser.....	89
4.5.1	Tingkat Kesejahteraan Kabupaten Paser.....	92
4.5.2	Indikator Perekonomian Ekspor dan Impor Kabupaten Paser	99
4.5.3	Indikator Perekonomian Kabupaten Paser	100
BAB V		105
PENUTUP.....		105
5.1	Kesimpulan.....	105
5.2	Rekomendasi	107
DAFTAR PUSTAKA.....		108
Lampiran 1 : Surat Keterangan penelitian		112
Lampiran 2 : Surat Keterangan penelitian		113

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perkembangan Penduduk Tahun 2008 – 2011.....	98
Tabel. 4.2 Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, dan TPT Kabupaten Paser, Tahun 2008 – 2012	101
Tabel 4.3 Struktur Ekonomi Kabupaten Paser, Tahun 2008 – 2012 (%)	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep Pemikiran.....	31
Gambar 4.1 Peta Kawasan Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan Kabupaten Paser.....	51
Gambar 4.2 Langkah Awal Illegal Konversi.....	54
Gambar 4.3 Truck pengangkut kayu bulat dari dalam hutan menuju pelabuhan. .	56
Gambar 4.4 Jalan Blok Pengambilan Kayu	58
Gambar 4.5 Masyarakat Mengambil Rotan.....	64
Gambar 4.5 Pengambilan Batu Bara di Kec. Batu Kajang	72
Gambar 4.6 Alih Fungsi Hutan	78

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Dampak Lingkungan
ADHB	: Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BRS	: Berita Resmi Statistik
CPO	: (Crude Palm Oil) Minyak Sawit Kasar
CO ₂	: Carbon Dioksida
DR	: Dana Reboisasi
FS	: (Feasibility study) Menilai Kelayakan
HPH	: Hak Pengusaha Hutan
HGU	: Hak Guna Usaha
Ha	: Hektare
HTI	: Hutan Tanaman Industri
IPK	: Ijin Pemanfaatan Kayu
IPKH	: Ijin Pelepasan Kawasan Hutan
IUPHHK	: Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
JOBLESS	: Tidak Bekerja
KK	: Kepala Keluarga
KM ²	: Kilometer persegi
KBNK	: Kawasan Budidaya Non Kehutanan
KBK	: Kawasan Budidaya Kehutanan
LSM	: Lembaga Suwadaya Masyarakat
M ³	: Meter Kubik

SDM : Sumber Daya Manusia

SKT : Surat Keterangan Tanah

SUSENAS : Survei Sosial Ekonomi Nasional

SAKERNAS: Survei Angkatan Kerja Nasional

Reboisasi : Peremajaan Hutan

UPT : Unit Pemukiman Tanah

TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

PDRB : Peroduk Domestik Regional Bruto

PSDH : Provisi Sumber Daya Hutan / Pungutan Hasil Hutan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan penelitian

Lampiran 2 : Surat Keterangan penelitian

Lampiran 3 : Dokumentasi wawancara

Lampiran 4 : Dokumentasi wawancara

Lampiran 5 : Dokumentasi Perjalanan Selama Penelitian

Lampiran 6 : Dokumentasi Dikantor Desa penelitian

Lampiran 7 : Dokumentasi Tokoh Masyarakat di Desa Pedalaman Penelitian

Lampiran 9 : Jalan Rusak Menuju Desa pedalaman Muara Komam

Lampiran 8 : Dokumentasi Foto Musium Desa Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kalimantan timur khususnya Kabupaten Paser terdapat sumber daya alam yang luar biasa banyaknya akan tetapi seiring perkembangan dunia akan kebutuhan ekonomi. Hutan beralih fungsi menjadi perkebunan dan pertambangan. Oleh karena itu fokus penelitian ini membahas tentang dampak alih fungsi hutan terhadap kesejahteraan masyarakat adat pedalaman. Lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Paser tepatnya pada dua kecamatan dan empat desa yang terkena dampak alih fungsi hutan. Dampak ini berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di dua kecamatan yaitu Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Paser Belengkong.

Penelitian dilakukan di empat desa karena peneliti mengetahui banyaknya permasalahan dan bagaimana perkembangan pembangunan berkelanjutan terlebih lagi keberadaan masyarakat pedalaman Kabupaten Paser yang berada di wilayah konversi hutan. Konversi hutan dilakukan karena adanya peran sektor swasta dalam membangun perkebunan dan pertambangan dikawasan hutan masyarakat adat. Konversi hutan dilakukan sangat mudah karena adanya dukungan dari masyarakat untuk harapan kesejahteraan lebih baik dari pada keadaan sebelumnya¹.

¹ maswara. 2015. Peran kejaksaan dalam alih fungsi hutan adat menjadi perkebunan kelapa sawit. Laporan praktik kerja nyata. Universitas brawijaya malang. Hal 5

Luasan hutan dan potensi sumber daya alam. Diatas permukaan tanah terdapat kayu yang melimpah, dibawah tanah terdapat batu bara dan migas. Akan tetapi hak atas hutan dan masyarakat adat yang berada didalam wilayah konversi. Telah beralih fungsi menjadi perkebunan dan pertambangan. Penelitian ini akan menjelaskan bahwa masyarakat adat dan hutan merupakan satu kesatuan dalam kelangsungan hidup. Berlangsung dalam suatu kelompok masyarakat berdasarkan asal usul leluhur. Secara turun menurun diatas wilayah luasan desa dan tata batas adat. memiliki kedaulatan atas tanah, kekayaan alam dan kehidupan sosial budaya semua ini telah diatur oleh hukum adat.

Adanya masalah akibat dari pembukaan hutan menjadi perkebunan dan pertambangan, yang mengakibatkan hilangnya jaminan kesejahteraan masyarakat pedalaman. Banyak permasalahan yang terjadi di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Terutama permasalahan dampak akibat alih fungsi hutan berupa ketidak pastian status hak masyarakat adat dikawasan hutan serta ketidak jelasan tata batas kawasan hutan. Hampir setiap kasus pembalakan liar menjadi perkebunan dan pertambangan. Di Kabupaten Paser masyarakat pedalaman seringkali berada di posisi yang lemah, dikarenakan keterbelakangan pengetahuan akan kejelasan hukum yang diterapkan pemerintah terkait alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan pertambangan.

Sehingga sampai saat ini masih belum ada jalan keluar untuk penyelesaian permasalahan dampak alih fungsi hutan. Kabar terbaru dalam perkembangan hukum saat ini, yang mengatur hutan dan peranan masyarakat adat semakin dipertegas dengan keputusan mahkamah konstitusi, Nomor 35/PUU-X/2012 terkait

Uji Materi UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan adanya pasal tersebut sudah jelas tentang hak hutan yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

Akan tetapi dalam perkembangan perkebunan kelapa sawit yang mendominasi mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial yang baru seperti². Ketidakadilan terhadap masyarakat adat ini terjadi baik di bidang sosial, politik, ekonomi, dan hukum³ karena adanya keterkaitan politik dalam alih fungsi hutan peneliti melakukan penelitian. Pada kenyataannya lapangan menjadi lebih buruk lagi akibat keputusan politik yang lebih mendukung perusahaan swasta untuk membangun dan mengalih fungsikan hutan menjadi perkebunan dan pertambangan.

Perlakuan kurang adil akibat alih fungsi hutan, dapat dilihat dengan sangat jelas pada pengkategorian seperti, masyarakat yang merusak hutan akibat ladang berpindah, pembakaran hutan, sebenarnya yang terjadi lapangan tidak seperti pemberitaan di media pada biasanya, bahwa kerusakan tidak dilakukan masyarakat setempat. Akan tetapi asal muasal dari kerusakan lingkungan ini bermula dari kebijakan pemerintah yang memberikan izin untuk pemanfaatan hutan menjadi perkebunan dan pertambangan.

Karena memperoleh lahan hutan yang relatif mudah, maka pihak perusahaan dapat dengan mudah menebang habis hutan serta menjual kayunya sebagai bisnis sampingan menguntungkan hal ini, di luar dari keuntungan hasil panen kelapa sawit. Hanya tertarik mengambil kayu dari pada menanam kelapa

² UU Nomor 41 tentang Kehutanan Tahun 1999 diakses 17 November 2015

³ Abdon Nababan. *Pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat*. Antara Konsep dan Realitas Oleh Abdon Nababan | Otonomi Daerah Pemberlanjutan engrusakan Hutan. Diakses pada 16 nov 2015 pkl 12.00 wib.

sawit pada wilayah konsesinya. Peraturan menteri pertanian nomor 81/pemerintah/OT. 140/8/2013 tentang pedoman teknis tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sedangkan kalangan masyarakat lokal yang kehilangan hutan mereka berakibat berdampak pada sumber perekonomian. Proses alih fungsi hutan pada dasarnya bagian dari proses yang menyertai terjadinya konsentrasi. Penguasaan sumberdaya khususnya sumberdaya alam. Kecenderungan umum di negara-negara dunia ketiga. Secara signifikan adalah terjadinya penguasaan sumberdaya lahan terbaik pada sekelompok minoritas terkaya⁴.

Mengakibatkan banyaknya kesenjangan dalam kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat pedalam diKabupaten Paser, saat ini menjadi korban akibat. Pembukaan perkebunan kelapa sawit Jumlah hutan dibuka mencapai puluhan ribu hektar. Mengakibatkan masyarakat pedalam asli Kalimantan timur kebingungan karena telah kehilangan hutan. Mereka yang sudah menghidupi masyarakat adat secara turun temurun dengan hasil alam yang mereka miliki. Tidak hanya masyarakat kehilangan hutan mereka melainkan juga masyarakat. Kehilangan sumber perekonomian yang selama ini secara turun temurun menjadi ladang untuk menghasilkan beberapa produk yang masyarakat bisa olah seperti rotan, getah kayu dammar, pohon garu, sudah cukup untuk menghidupi masyarakat adat tanpa harus membumi hanguskan hutan selama ini dijaga oleh masyarakat adat.

⁴ Rustiadi, 2000, skripsi. *Masalah Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kebijakan Ekonomi bagi Pengendalian Terhadap Kerusakannya. Lokakarya Nasional Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Institut Pertanian Bogor.

Dapat diteliti pengaruh alih fungsi hutan sangat berpengaruh dalam perkembangan kesejahteraan masyarakat. Erat kaitanya dengan perusahaan yang menekan masyarakat untuk kepentingan bisnis. Terjadi dilapangan tanpa ada campur tangan pemerintah dalam mengontrol investasi perusahaan didaerah paser. Masalah Indonesia saat ini tidak lepas mengenai kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Menurut rumusan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1. adalah: “Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir dan batin. Memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan. Jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila⁵.

Sedangkan menurut Alfred J.Khan Kesejahteraan sosial terdiri dari program-program yang tersedia selain yang tercakup dalam kriteria pasar untuk menjamin suatu tindakan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan kesejahteraan, dengan tujuan meningkatkan derajat kehidupan komunal dan berfungsinya individual, agar dapat mudah menggunakan pelayanan-pelayanan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1. Diakses pada 12 november 2015.

maupun lembaga-lembaga yang ada pada umumnya serta membantu mereka yang mengalami kesulitan dan dalam pemenuhan kebutuhan mereka⁶.

Sebagai kegiatan yang terorganisir Menurut Durham peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial. Waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu. Individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan - kesatuan penduduk yang lebih luas.

Kerusakan lingkungan sebenarnya tidak hanya menyerang lingkungan itu sendiri juga mengakibatkan kerusakan pada manusia sebagai pelaku pembangunan⁷. Akibat hilangnya hutan menjadi perkebunan dan pertambangan ada dampak negative dan dampak positif yaitu dimana sebagian masyarakat mendapatkan. Fasilitas sarana dan prasarana Diisi lain masyarakat juga mendapatkan. Dampak dari alih fungsi hutan yang berdampak pada kemiskinan karena kurangnya. Lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Dampak dari kerusakan lingkungan mengakibatkan banyak kehilangan potensi - potensi sumber daya alam. Secara tidak langsung dihilangkan oleh perusahaan telah melakukan alih fungsi hutan. Tanpa memikirkan dampak dari hilangnya hutan bagi masyarakat adat paser alih fungsi hutan ini adalah sebuah ketimpangan kebijakan dari pemerintah dalam pembukaan, perluasan perkebunan

⁶ Sumarnonugroho, 1999 hal :28-35

⁷ Santoso nur sayyid. 2015. *kapitalisme Negara masyarakat*. Yogyakarta:pustaka pelajar. Hlm. 128

dan pertambangan terjadi di kecamatan pasir blengkong, dan kecamatan muara komam.

Melihat alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan kenyataan yang terjadi dilapangan. Terhadap pengaruh kesejahteraan masyarakat pedalaman kabupaten paser di desa laburan dan muara komam. Seperti dijabarkan diatas maka perlu dikaji regulasi alih fungsi hutan dalam kondisi empirisnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengangkat judul : “ **DAMPAK ALIH FUNGSI HUTAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT PEDALAMAN KABUPATEN PASER KALIMANTAN TIMUR**”

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dalam mendukung penelitian ini. Adapun beberapa pertanyaan tersebut ialah :

- a. Apa dampak dari perijinan alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat ?
- b. Bagaimana peran pemerintah dan sektor swasta dalam menyelesaikan permasalahan akibat alih fungsi hutan terhadap kesejahteraan masyarakat dan kerusakan lingkungan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui motif pihak swasta dalam melakukan alih fungsi hutan

- b. Untuk mengetahui peran pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Dari pembukaan lahan desa untuk perkebunan apakah berpengaruh dalam kesejahteraan suatu desa yang berada di pedalaman Kalimantan timur.
- c. Mengetahui pelaku - pelaku dibalik alih fungsi hutan.
- d. Mengetahui bagaimana proses terjadinya alih fungsi hutan dan keterkaitan dengan kesejahteraan masyarakat pedalaman.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi program studi ilmu politik khususnya dalam ekonomi politik, politik lingkungan, Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Yang pada sebelumnya, selalu berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, di dalam Negara Indonesia ini terutama di Kalimantan timur sampai saat ini harus mendapat perhatian dan pembangunan kusus untuk kesejahteraan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Tanah Paser dalam melaksanakan Program demi memajukan kesejahteraan. Salah satunya dengan pembangunan perekonomian desa yaitu dengan membuka perkebunan dan pertambangan untuk masyarakat desa hal tersebut juga untuk terlaksanya kemajuan, kesejahteraan kehidupan masyarakat pedalaman dan dengan melibatkan elemen masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Saling

bersinergi untuk pembangunan perekonomian di Daerah tanpa melakukan merusak hutan dan berakibat pada rusaknya lingkungan. Demi keberlangsungan ekosistem alam harus ada sebuah pemikiran dan tindakan nyata dari bimbingan pemerintah daerah berserta kesadaran masyarakat, untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan tanpa perlu merusak ekosistem flora dan fauna yang ada di hutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritik

2.1.1 Ekonomi Politik

Dalam penelitian ini ekonomi politik berkaitan dengan keadaan masyarakat terkena dampak akibat pembukaan hutan dan alih fungsi lahan terjadi di Desa Mura Komam. Yang belum seluruh wilayahnya mengalami pembukaan hutan berbanding terbalik dengan Desa Perepat seluruh wilayahnya terbukan akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Martin staniland memberikan pandangannya mengenai pendekatan ekonomi politik politik sebagai hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan yang saling menguntungkan antara sumber sumber produksi, distrubusi, dan konsumsi. Termasuk didalamnya sumber - sumber yang terkait dalam alih fungsi hutan terhadap kesejahteraan masyarakat berdampak pada perekonomian masyarakat mengalami kesenjangan sosial. Dikareanakan hutan yang selama ini menjadi sumber perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, sudah terganggu dengan adanya pembukaan hutan⁸.

⁸ Awang Farok, 2012, Provisi Kalimantan Timur, hasil pengelolaan hutan untuk menangani menjadi panduan bagi Pemprov Kalimantan Timur dalam upaya mengurangi emisi. Apalagi di dalamnya telah memuat visi tentang tata kelola sumber daya hutan dan lingkungan agar mampu menyelaraskan fungsi lingkungan dan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. lihat <http://www.gcftaskforce.org/documents/Kaltim%20-%20GCF%20Draft%20Booklet.pdf> diakses pada 7 november 2015.

Analisis ekonomi politik yaitu dengan cara pendekatan yang bersumber dari teori ekonomi untuk memahami permasalahan – permasalahan politik. Dalam metode analisis ekonomi politik, teori politik dimanfaatkan untuk memahami permasalahan ekonomi yang terjadi dalam suatu peristiwa⁹. Tempat penelitian berkaitan dengan ekonomi politik, karena adanya desakan ekonomi oleh perkembangan dunia dan kebutuhan pasar sehingga pemerintah membuat kebijakan politik yang berperan dalam memberikan ijin untuk *eksploitasi*¹⁰ pembukaan hutan menjadi perkebunan dan pertambangan.

Adanya pengaruh ekonomi politik dari sektor swasta, berusaha mengalih fungsikan hutan primer maupun hutan sekunder, yang ada Kabupaten Paser. Dengan cara menggunakan aktor politik sebagai fasilitator untuk memberikan perijinan pembukaan hutan untuk pertambangan dan perkebunan. Tanpa memikirkan adanya masyarakat lokal yang telah bertahan hidup selama ini dengan menggunakan sumberdaya alam sebagai sumber kehidupan mereka.

Setelah habisnya hutan alam Kalimantan pengaruh alih fungsi hutan, banyak terjadi permasalahan - permasalahan sosial terjadi di Daerah Tanah Paser. Yaitu permasalahan banjir, kebakaran hutan akibat pembukaan lahan secara besar-besaran. Pola ideal dalam mengatasi permasalahan saat ini ialah dengan cara. Apabila dari perusahaan, pemerintah sebagai fasilitator untuk pembukaan dan pemanfaatan lahan hutan, haruslah masyarakat pedalaman yang berada di dalam

⁹ Deliarov 2006 *ekonomi politik*. Jakarta:erlangga. hlm. 16

¹⁰ Eksploitasi hutan adalah suatu tindakan untuk memanfaatkan sumberdaya hutan secara berlebihan dan sewenang – wenang dampak dari eksploitasi ini dapat merugikan lingkungan atau pada orang lain.

hutan yang terkena dampak akibat pembukaan hutan dari pihak perusahaan dan pemerintah memberikan jaminan kehidupan seperti¹¹.

- a. Memberikan kompensasi yang sepadan atas hilangnya hutan masyarakat pedalaman, dari sektor pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan ekologi, hilangnya kearifan lokal.
- b. Memberikan jaminan kehidupan sebagai sumber perekonomian karena hilangnya hutan, sebagai contoh : Apabila perusahaan mengalih fungsikan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, masyarakat diikut sertakan sebagai petani sawit, dibantu oleh perusahaan dalam pembangunan perkebunan.
- c. Dengan catatan tidak ada monopoli perusahaan yang mengikat/menjerat masyarakat kedalam system kapitalisme.

Penjelasan diatas adalah penjelasan bentuk ideal tentang pembukaan hutan yang haruslah masyarakat rasakan dampak positifnya. Ada beberapa kerugian yang cukup mengganggu dalam kesejahteraan masyarakat dan ekologi alam, perlu mendapat perhatian khusus dan penyelesaian permasalahan antara perusahaan dan masyarakat. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk pemanfaatan hutan/lahan. Dibawah ini adalah beberapa contoh kasus kerugian bagi lingkungan dan masyarakat yaitu :

- a. Konflik sumberdaya alam, pembukan pertambangan, bermasalah dengan ekosistem alam akan hilang ekosistem hutan seperti flora dan fauna dan

¹¹Oding afandi. 2013 *Kebijakan alih fungsi hutan*. Berakibat buruk untuk lingkungan dan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Lihat Alih Fungsi Hutan suatu Analisis Etika Lingkungan dan Kehutanan diakses melalui www.academia.edu/11998922/Kebijakan. Pada 7 november 2015 pkl 23.00

menimbulkan dampak negatif pada masyarakat sekitar. Tercemarnya sungai-sungai akibat pembukaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

- b. Pembukaan perkebunan menimbulkan permasalahan dengan masyarakat akibat hilangnya hutan mereka, dan menimbulkan permasalahan mengenai kejelasan tata batas dengan perusaan yang membuka perkebunan.

Menurut peneliti pembangunan Keberlanjutan ekonomi adalah dalam pengertian mempertahankan agar kapital sumberdaya alam tidak mengalami kerusakan, diperlukannya pembangunan prekonomian¹². Berkelanjutan pembangunan yang baik bagi pertumbuhan, pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat tingkat kesejahteraan.

2.2 Tinjauan Konseptual

2.2.1 Konsep Alih Fungsi Hutan

Konsep alih fungsi hutan bisa di definisikan sebagai Konversi lahan hutan untuk penggunaan lahan lain untuk kepentingan kepentingan lahan pertanian dan pertambangan, kerusakan hutan bisa disebut *deforestation* mencakup lahan hutan yang dipakai untuk infastruktur seperti bangunan, pertambangan, tempat permukiman dan perkebunan¹³. Myers menyatakan bahwa penghancuran tutupan hutan secara sempurna melalui pembersihan lahan *land clearing* menyebabkan rusaknya lingkungan. Akibat rusaknya lingkungan disebabkan melalui pengaruh manusia, kerusakan dan perbaikan hutan *Reforestation* penghutanan kembali yang

¹² Ibid41

¹³ Herman Hidayat. berjudul Politik lingkungan pengelolaan hutan masa orde baru dan reformasi. Yayasan obor Indonesia ngrumat bondo utomo.tahun 2008 hal. 90

biasa diberitakan dimedia dengan sebutan reboisasi.¹⁴ Rata – rata kerusakan hutan sekarang melampaui 0,4 ha per detik dan setiap hektar mengandung jutaan fauna yang mewakili ribuan spesis biologis terjadi kerusakan habitat sebanyak 10.000 spesis musnah setiap tahun dan menjadi masalah global yang harus diselesaikan dengan serius. Faktor yang menjadi kerusakan hutan seperti, penebangan log yang berlebihan. *Illegal logging*, alih fungsi hutan produksi untuk kepentingan diluar sektor kehutanan seperti perkebunan kelapa sawit dan tranmigrasi. Perambahan hutan pembuatan perkebunan kelapa sawit yang melebihi peta tata runag ijin perkebunan kondisi ini terjadi diseluruh pulau Kalimantan dan pulau Sumatra. Akibat pengelolaan hutan yang salah merupakan sebab utama rusaknya hutan indonesia pada rezim Suharto. Ada tiga faktor yang berperan besar dalam kerusakan hutan ini yaitu :

- a. Tingkah laku para politisi dan sikap mengambil keputusan didalam pemerintahan membentuk dan mendorong faktor beragam yang member kontribusi atas kerusakan hutan tropis.
- b. Kelengahan dalam pengawasan anantara aparat kehutanan baik dipusat dan daerah didalam menerapkan prinsip pengelolaan hutan yang lestari.
- c. Kurangnya penegakan hukum dan pemberian saksi yang tegas bagi pengusaha swasta baik domestik maupun Transnasional, yang melanggar peraturan industry kehutanan¹⁵.

Akibat dari konsesi (HPH) Hak Pengusahaan Hutan mendapatkan hasil akhir yang mengenai praktik – praktik konsesi HPH. Aparat kehutanan mempunyai

¹⁴Ibid hal 91

¹⁵ Ibid hal 90

sedikit pengetahuan mengenai lahan yang ditunjuk sebagai lahan hutan produksi hak – hak tradisional masyarakat yang hidup disekitar hutan, dan pentingnya konservasi dari ekosistem hutan. Dengan demikian kelemahan dari kelembagaan pengelolaan hutan telah menghasilkan penebangan kayu yang tidak efisiensi, kehancuran yang tidak perlu atas pohon pohon yang tersisa, limbah kayu yang berlebihan tersisa didalam hutan dan pengaruh yang serius atas populasi binatang serta rusaknya sepsis biologis asli Kalimantan, erosi tanah dan asap.¹⁶

Pemilik konsesi HPH dan pedagang kayu melakukan penbangan kayu log yang berlebihan, baik di area hutan produksi dan di hutan konversi. Namun mereka tidak melakukan *reforestation* (penanaman hutan kembali) dibekas area hutan produksi. Ini menjadi faktor pendorong kerusakan hutan tropis, karena banyak lahan kosong menjadi alang-alang, erosi tanah yang pada akhirnya terjadi banjir dan panas. Terjadi diKalimantan Timur di ketika banjir Sungai Mahakam dan ketika kering terjadi kebakaran hutan. Dengan demikian, pernyataan myres mengenai *deforestation*, merujuk pada kehancuran hutan secara sempurna melalui *land clearing* (pembersihan lahan) untuk konversi lahan buat tujuan pertanian, perkebunan, dan tranmigrasi. Keadaan ini merupakan bentuk penghancuran tutupan hutan baik, secara dengan illegal dan legal.¹⁷ Peraturan per undang-undangan UU No. 41 tahun 1999 pasal 19, istilah alih fungsi dikenal sebagai perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Perubahan peruntukan kawasan hutan, terjadi melalui peruses tukar menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan. Alih fungsi kawasan hutan yang terjadi melalui peruntukan

¹⁶ Ibid hal 89

¹⁷ Ibid hal 92

kawasan hutan terfokus untuk mendukung kepentingan diluar kehutanan yang berbasis kepentingan ekonomi antara lain diperuntukan (perkebunan, pertanian, transmigrasi, pengembangan wilayah, pembukaan pertambangan dan aktivitas non kehutanan). Alih fungsi hutan dapat melalui perubahan fungsi hutan namun tidak mengurangi luas kawasan hutan, misalnya diperuntukan pembangunan kehutanan konversi kawasan hutan alam/tanaman, dan juga diperuntukan hutan pendidikan, penelitian.¹⁸

Kondisi hutan Kalimantan, akibat pengaruh alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, pertambangan, dan pemanfaatan kayu asli hutan Kalimantan, dilakukan oleh perusahaan perusahaan besar, terjadi mulai era 1973 Kalimantan sudah diambil hasil hutannya. Kenyataan dilapangan faktor utama yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi hutan, untuk kegiatan diluar sektor kehutanan diantaranya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Cepatnya perkebunan pembukaan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit baik di hutan primer maupun di hutan sekunder, banyak menimbulkan masalah yang berdampak negative untuk masyarakat maupun dunia.¹⁹

Pembukaan perkebunan kelapa sawit merusak ekosistem hutan, terdegradasi lahan gambut, dan punahnya habitat hewan asli Kalimantan timbulnya beragam masalah sosial, rusaknya hutan Kalimantan ini akibat pembukaan

¹⁸Alih Fungsi Kawasan hutan hanya untuk optimalisasi fungsi kawasan hutan diakses melalui web dinas kehutanan <http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/1515>. pada 27 maret 2016 pukul 20.00 wib.

¹⁹Membahas tentang pembukaan hutan secara global untuk kebutuhan ekonomi di bidang perkebunan dengan judul *Global Forest Resources Assessment: Progress towards Sustainable Forest Management, Food and Agriculture* didownload pdf pada 04 oktober 2015

lahan.perkebunan kelapa sawit, cara termudah untuk membuka hutan untuk perkebunan sawit dengan melakukan tebang bersih lahan walaupun belum mendapatkan, Ijinan Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Cara termudah untuk mendapatkan modal, dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dikerjakan oleh pihak swasta dari tebangan kayu ilegal. Untuk memulai pembuatan perkebunan kelapa sawit.²⁰ Saat dunia membutuhkan oksigen terutama Indonesia sebagai penghasil oksigen dunia salah satu penyumbang oksigen terbesar didunia adalah Pulau Kalimantan sebagai paru - paru Dunia.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencegah laju penggundulan hutan, dengan melanjutkan kebijakan. Penghentian sementara ijin pengelolaan hutan dan lahan gambut yang diterapkan sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.²¹ Dalam pembangunan dan perkembangan pemanfaatan hutan wilayah Kalimantan Timur. Terutama Kabupaten Paser Kecamatan Tanah Grogot pembukaan lahan hutan di kontrol dengan undang undang Perubahan peruntukan kawasan hutan, terjadi melalui proses tukar menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan. UU No. 41 tahun 1999 pasal 19, istilah alih fungsi dikenal sebagai perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

²⁰Membahas tentang pembukaan hutan secara global untuk kebutuhan ekonomi di bidang perkebunan dengan judul *Global Forest Resources Assessment: Progress towards Sustainable Forest Management, Food and Agriculture* didownload pdf pada 04 oktober 2015

²¹Pembangunan dan pemanfaatan hutan yang dikontrol dengan undang undang peneliti mengutip di berita web Diakses dari Bbc. bbc.com/indonesia/berita_indonesiasains_hutan diakses pada tanggal 04 oktober 2015, pada pukul 20.45.

Alih fungsi hutan pada wilayah Kabupaten Paser Kalimantan timur dimulai pada tahun 1987-2015. Disebabkan masalah krisis ekonomi sehingga pemerintah daerah dan provinsi memberikan ijin untuk mengalih fungsikan hutan. Dalam jangka waktu panjang alih fungsi hutan akan menimbulkan masalah ekologi. Masalah yang timbul akibat maraknya alih fungsi lahan hutan. Pada wilayah daerah Kabupaten Paser berakibat banjir, kurangnya resapan air dan hilangnya ekosistem yang terdapat didalam hutan.

Akibat penebangan hutan melebihi ketentuan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan sebagai pemasok air untuk masyarakat. Hutan berfungsi sebagai penghasil oksigen melalui kumpulan - kumpulan pohon mampu memproduksi oksigen. Saat ini sangat dihargai dunia oksigen yang dihasilkan Negara Indonesia. Sebagai paru paru dunia karena Indonesia memiliki hutan tropis yang menghasilkan oksigen berkualitas no 1 di dunia²². Akan tetapi pemerintah saat ini membiarkan pengalih fungsian hutan menjadi perkebunan menyebabkan hilangnya hutan sebagai faktor keseimbangan alam akan berdampak pada ekologi daerah setempat.

Desa muara komam saat ini yang terletak didaerah kawasan hutan lindung seharusnya hutan lindung tersebut harus dijaga dan tidak boleh dialih fungsikan desa ini terancam kan di alih fungsikan menjadi perkebunan dan pertambangan batu bara.

²² Yeti Rusli, Data Strategis Kehutanan 2008, Jakarta: Departemen Kehutanan, 2008, h. 153.

2.2.2 Konsep Masyarakat Adat Pedalaman

Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Tidak berbeda dengan masyarakat hukum adat adalah bahasa remi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sedangkan istilah masyarakat hukum adat digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritis. Sedangkan bahasa masyarakat adat adalah istilah yang dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari yang mengacu pada kesepakatan internasional yang sudah dikenal luas.²³

Masyarakat Adat pedalaman Kabupaten Paser terletak di Desa Laburan dan Desa Sunge Batu masyarakat pedalaman. Pengertian masyarakat adat adalah komunitas – komunitas yang hidup berdasarkan, asal usul leluhur secara turun menurun diatas luas wilayah adat, memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan sumber daya alam, kehidupan sosial budaya, diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan hidup masyarakat²⁴. Selama ini dari turun temurun masyarakat adat telah mengelola sumberdaya alam berupa rotan, buah buahan hutan, pohon gaharu dan getah damar.

Sebagai sumber penghasilan penduduk pedalaman. Hak – hak dimiliki masyarakat adat adalah menjalankan system pemerintahan sendiri, mengelola sumber daya alam sendiri terutama untuk kebutuhan warganya contoh :

²³Taqwaddin, “*Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36

²⁴Martua sirait, 2001, membahas tentang, *Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam era Otonomi Daerah*, Icrat latin, hal : 8

Mengelola lahan hutan untuk menanam padi gunung, menanam rotan semambu, dan mengambil pohon garu. Hak ikut serta dalam setiap transaksi dikawasan lingkungannya. Hak menentukan pradilan didalam Desa untuk hak hak adat. Subjek hak masyarakat atas wilayah adat disebut sebagai hak ulayat²⁵. Keberadaan masyarakat adat dan haknya pada sumberdaya hutan yang bersumber dari otoritas adat adalah kenyataan yang tidak dapat diingkari. Sejak masa kolonial sampai kini, berbagai studi menyatakan pengakuannya dengan derajat berbeda terhadap hal tersebut.

Kehadiran hukum negara yang berupaya mengatur masyarakat adat dan haknya pada sumber daya hutan juga bukanlah hal yang baru. Selama lebih dari tiga dasawarsa ini, pemerintah telah membuat berbagai peraturan menyangkut masyarakat adat. UU No.5 tahun 1967, PP No.21 tahun 1970, PP No.6 tahun 1999, Keputusan Menteri Kehutanan No.251/Kpts-II/1993 dan Keputusan Menteri Kehutanan No.47/Kpts-II/1998 adalah peraturan yang secara tegas mengatur mengenai hak-hak masyarakat adat di kawasan hutan seperti pengelolaan hasil hutan²⁶, tata batas tanah untuk penetapan desa saat ini masyarakat adat telah beralih menjadi masyarakat yang taat pada kebijakan dari pemerintah.

²⁵ Ibid 15

²⁶ Ibid 17

Masyarakat adat sebagai suatu komunitas memiliki asal usul leluhur secara turun menurun, hidup di daerah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi politik, budaya dan sosial yang khas²⁷.

2.2.3 Konsep Ekologi Politik

Pengaruh ekologi politik terhadap penelitian ini pengertian ekologi politik sebelumnya merupakan hasil dari perkembangan dari ilmu pengetahuan ekologi manusia, dan sosiologi lingkungan. Besar atau kecilnya pengelolaan sumberdaya alam tentunya akan memberikan perubahan bagi lingkungan. Unsur-unsur politik memegang peranan dalam proses tersebut. Seperti yang dikatakan Bryant bahwa ekologi politik fokus pada usaha mempelajari sumber, kondisi, dan implikasi politik dari perubahan lingkungan hidup. Kemudian Bryant juga mengatakan bahwa asumsi pokok ekologi politik ialah perubahan lingkungan tidak bersifat netral, tetapi merupakan suatu bentuk politik lingkungan yang banyak melibatkan aktor-aktor yang berkepentingan baik pada tingkat lokal, regional, maupun global. Oleh karena itu ekologi politik mempelajari hubungan kausal dan siklikal antara perubahan lingkungan dengan kegiatan politik yang terjadi dimana aktor-aktor yang berkepentingan saling beradu memegang peranan.

Ada beberapa kajian ekologi politik Pendekatan ekologi politik seperti dijelaskan di awal merupakan pendekatan yang multi metode dan multi dimensi yang mencakup sejarah, ekonomi, sosial, politik, dan ekologi. Sementara penekanan pada pendekatan aktor menjadi ciri khas pemikiran ekologi politik. Pendekatan ini berpusat pada pelaku.

²⁷ Ibid 25

Perbedaan kepentingan tersebut yang kemudian berkembang menjadi faktor penyebab konflik ekologi politik. Kepentingan yang berbeda dari masing-masing aktor ini berdasarkan pada ideologi yang mereka gunakan, sehingga menyebabkan perbedaan cara pandang para aktor terhadap sumberdaya alam²⁸. Hal ini berujung pada perbedaan pemanfaatan sumberdaya alam yang bisa saling tumpang tindih dalam suatu kawasan. Selain dari perbedaan ideologi, kepentingan, dan cara pandang, ada faktor lain yang juga menjadi penyebab munculnya konflik sumberdaya alam, yaitu janji-janji kesejahteraan yang tidak terpenuhi baik dari pihak korporat/kapitalis, pemerintah/negara (*state*), dan bahkan mungkin LSM kepada masyarakat yang bermukim di sekitar sumberdaya alam²⁹.

Semua makhluk hidup bernilai pada dirinya sendiri sehingga pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Alam perlu diperlakukan secara moral, terlepas dari apakah ia bernilai bagi manusia atau tidak. Seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak. Secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain³⁰. Oleh karena itu kewajiban moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup akan tetapi berlaku terhadap semua realitas ekologis. Politik ekologi mempunyai tiga dimensi penting yaitu :

²⁸ Harry Suryadi, Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Rencana Tindak Penanggulangan Bencana, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 1998, hal : 10.

²⁹ Alkhudri AT. 2012. Ekologi Politik : *Body of knowledge, sejarah pemikiran dan perkembangan empirik terkini*. (Jurnal Komunitas. Dikutip 04 Nopember 2013). 1-15. Dapat

³⁰ Membahas tentang ekologi politik yang dan dampak lingkungan akibat kurangnya perhatian dengan alam dan berdampak terhadap flora dan fauna. Peneliti mengutip di web diakses dari : <http://www.labsosiologiunj.org/wpcontent/uploads/2013/07/AHMAD-TARMIJI-A-EKOLOGI-POLITIK.Pdf>. diakses pada tanggal 18 april 2016

- a. Sumber politik, yaitu: kebijakan Negara hubungan antar Negara, dan kapitalisme Global, yang semuanya mengacu pentingnya tekanan Nasional dan Global terhadap lingkungan.
- b. Kondisi: konflik - konflik yang timbul dari perlawanan masyarakat lokal. Dimensi ini menekankan pada bagaimana sekelompok masyarakat dengan kekuasaan terbatas dapat dan terus berjuang mempertahankan kondisi suatu lingkungan yang menjadi tumpuan kehidupan mereka.
- c. Ramifikasi: konsekwensi politik perubahan lingkungan, dengan penekanan pada dampak sosial-ekonomi dan proses politik. Dalam kerangka ekologi politik, kebijakan negara mempunyai potensi besar untuk mengatur hubungan karena kebijakan tersebut akan membantu mengembangkan prioritas dan praktek-praktek yang harus dijalankan oleh negara, termasuk juga kerangka diskusi tentang perubahan lingkungan³¹.

Dari penjelasan di atas, menjelaskan bahwa keterkaitan teori ekologi dengan penelitian ini adalah bagaimana manusia sebagai makhluk hidup dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta dapat memanfaatkan teknologi untuk mengeksploitasi lingkungan tanpa harus merugikan lingkungan dan masyarakat itu sendiri.

Teori ekologi ini akan digunakan untuk membahas permasalahan yang ke tiga yaitu dampak dan makna yang ada di balik respons masyarakat setempat terhadap alih fungsi hutan yang terjadi di Kabupaten Paser dan fokus penelitian

³¹Harry Suryadi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia yang mengakibatkan dampak kabut asap : Rencana Tindak Penanggulangan Bencana, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 1998, hal : 1.

ini di dua Kecamatan di Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Paser Belengkong.

2.2.4 Konsep Welfare State

Dalam penelitian ini menggunakan teori konsep *welfare state* atau Negara kesejahteraan tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan itu sendiri. karena penelitian ini membahas tentang kesejahteraan. *Welfare state* merupakan jalan keluar dari solusi kebijakan yang bersifat *Top-Down*³². Terhadap jaminan kesejahteraan dimana upah buruh dikendalikan oleh kondisi pasar. Negara bisa disebut sebagai *welfare state* karena jaminan sosial ekonomi dinegara tersebut benar benar terjamin. Di Indonesia *welfare state* dalam kebijakan BPJS.

Dan jaminan pendidikan sembilan tahun dalam penelitian ini erat kaitanya dengan teori *welfare state*. Dikarenakan kepemilikan Negara atas kebijakan dan pembangunan produksi menggunakan tenaga kerja yang banyak dapat memberayakan masyarakat disekelilingnya. Dan untuk mendapatkan kesejahteraan haruslah memproduksi kebutuhan pokok³³. Inti dari peningkatan kesejahteraan tidalah harus dimiliki oleh pemerintah dan pihak swasta melaikan masyarakat diberdayakan untuk mengelola sumberdaya alamnya sendiri tanpa harus mengeksploitasi hasil tambang yang tidak dapat diperbaharui. Dan hutan tidak perlu dialih fungsikan untuk menjadikan embel - embel masyarakat dapat sejahtera. Apabila banyak pembangunan didesa.

³² Ainur Rofieq. *PELAYANAN PUBLIK DAN WELFARE STATE*.jurnal. Universitas islam malang.

³³ Tom g. palmer. 2012. *After the welfarwe state*.washington.dc diakses pada 12 november 2015

Pembangunan perkembangan pembukaan perkebunan kelapa sawit dan eksploitasi pertambangan. Pembangunan revolusi hijau dengan menggunakan logika industri sebagai proses berkelanjutan mengubah pengolahan ladang masyarakat. Menjadi perladangan milik perusahaan membuka perluasan hutan secara mekanis menggunakan alat berat melakukan pemusnahan masal ekosistem alam. Kerusakan lingkungan, industrialisasi, dan kemiskinan adalah tiga sektor yang saling berkaitan kemiskinan memaksa untuk mengadakan industrialisasi. Dan industrialisasi menyebabkan kerusakan lingkungan. Mengeksploitasi untuk mempertahankan hidup saat inilah. Yang terjadi di desa perpat dan desa muara komam akibat dari pembukaan hutan dan pertambangan³⁴.

Kompleksitas permasalahan lingkungan skala global, regional, dan lokal. Saling terkait sehingga mendapat perhatian khusus untuk menanganinya. Dalam suatu ekosistem komponen-komponen sub system berinteraksi secara dinamis membentuk satu kesatuan ekologi dalam ekologi gangguan terhadap suatu komponen, secara keseluruhan akan mengakibatkan permasalahan lingkungan hidup.³⁵ Keberlanjutan ekologis sangat diperuntukan dalam kehidupan manusia karena kehidupan ini akan berlanjut dengan baik dengan adanya keberadaan dan kualitas lingkungan yang baik, oleh karena itu untuk pemanfaatan sumber daya alam jangan terlalu dieksploitasi untuk keberlangsungan kehidupan manusia di bumi.³⁶

³⁴ Nur sayyid santoso kristeva, kapitalisme Negara dan masyarakat hal 128

³⁵ Chay asdak, ph.d, kajian lingkungan hidup strategis, jalan menuju pembangunan berkelanjutan hal 1

³⁶ Ibid 41

Peneliti mengharapkan apabila ada munculnya suatu gerakan yang peduli dengan lingkungan lebih diutamakan dari pada pembangunan yang eksploitasi sumberdaya alam, tanpa memikirkan keberlangsungan berlanjutan kehidupan masyarakat sekitar dan manusia di Bumi. Partai-partai hijau yang mengedepankan prioritas lingkungan dalam agenda politik, sebagai pedoman dan acuan untuk memajukan³⁷ desa yang sudah terkena dampak dari eksploitasi perkebunan dan pertambangan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Bersamaan dengan penelitian mengenai fokus alih fungsi hutan terhadap kesejahteraan masyarakat yang terjadi, didesa perepat dan perbandingan desa mura komam yang terkena dampak akibat dari pembukaan hutan. Penelitian yang pernah dilakukan sebagai berikut : Penelitian pertama yang dilakukan oleh Muhammad Utiyal Huda berjudul “Pengaruh Alih Fungsi Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap sifat kimia tanah” metode penelitian yang digunakan penelitian observatif, data diambil³⁸.

Diperoleh langsung dengan cara pengambilan sampel dari lapangan kemudian dilakukan analisis tanah untuk mendapat data kuantitatif. Agar penelitian yang diambil sesuai dengan kenyataan dilapangan. Hasil penelitian yang didapat adalah hutan dan system ekologinya, kerusakan tanah akibat pembukaan hutan, dan kerusakan humus tanah akibat penanaman kelapa sawit

³⁷ Nicolas low Brendan Gleeson. Politik hijau, kritik terhadap politik konvensional menuju politik berwawasan lingkungan dan keadilan. Hal. 30-39

³⁸ Muhammad Utiyal Huda. *Pengaruh Alih Fungsi Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap sifat kimia tanah*. Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara Medan 2008. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27385/4/Chapter%20I.pdf>. Diakses pada tanggal 6 november 2015

setelah umur delapan tahun. Adanya penelitian yang lebih untuk perubahan ekologi akibat pembukaan lahan hutan menjadi perkebunan. Penelitian kedua yang diteliti oleh Marhadi Slamet Kistiyanto, mengenai fokus pengaruh alih fungsi hutan erat kaitannya dengan kesejahteraan. Penelitian yang pernah diteliti adalah penelitian tentang pertanian menjadi perkebunan Kelapa sawit terhadap tingkat kesejahteraan petani kecamatan babulu kabupaten penajam paser utara Kalimantan timur³⁹.

Cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebelumnya menggunakan data kuesioner penentuan sample area bisa juga disebut menggunakan metode kuantitatif sehingga analisis dapat mengolah data menggunakan metode statistik. penelitian ini dilakukan agar pembaca dapat mengetahui dampak akibat penanaman perkebunan kelapa sawit, yang dahulunya lahan petani adalah lahan persawahan sehingga hari ini berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Penelitian ketiga, penelitian yang dilakukan oleh bambang paramudya membahas tentang efek pembukaan lahan terhadap karakteristik biofosik gambut pada perkebunan kelapa sawit dikabupaten bengkalis. metode yang digunakan adalah metode berdasarkan survey lapangan melalui pengukur tanah dan menggunakan metode kuantitatif. Agar mendapatkan hasil yang maksimal dan valid⁴⁰. Perubahan fungsi lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit menunjukkan

³⁹Marhadi Slamet Kistiyanto. *penelitian tentang pertanian menjadi perkebunan Kelapa sawit terhadap tingkat kesejahteraan petani kecamatan babulu kabupaten penajam paser utara Kalimantan timur*.<http://jurnalonline.um.ac.id/data/artikel/artikelIF17F5FB6B64E2FA8AC869AB49C2986AA.pdf>. universitan negri malang diakses pada 2015-11-06

⁴⁰ Bambang paramudya. *efek pembukaan lahan terhdap karakteristik biofosik gambut pada perkebunan kelapa sawit dikabupaten bengkalis*. http://repository.uin-suska.ac.id/5129/1/2012_201210PTN.pdf. pada tgl 6 Nov., 15.

terjadinya perubahan sifat kimia tanah diantaranya, pH, C-organik, Kapasitas tukar kation, N total dan bahan organik. Pada tanah hutan memiliki pH 4,49 dan berubah menjadi 4,52 pada usia tanam 2 tahun, 4,76 pada usia tanam 8 tahun dan 5.02 pada usia tanam 16 tahun.

Tabel 2.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Deskripsi	Titik Pembeda
Muhammad Utiyah Huda Universitas Sumatera Utara Medan. (2008)	Pengaruh Alih Fungsi Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap sifat kimia tanah.	Adanya hutan dan system ekologi, kerusakan tanah akibat pembukaan hutan, dan kerusakan humus tanah akibat penanaman kelapa sawit setelah umur delapan tahun.	Alih fungsi hutan yang berdampak pada ekologi dan masyarakat yang terkait pada prekonomian. Akibat adanya perkebunan kelapa sawit.
Drs. Marhadi Slamet Kistiyanto Fakultas perkebunan Universitas negeri malang. (2012).	Penelitian tentang pertanian menjadi perkebunan Kelapa sawit terhadap tingkat kesejahteraan petani kecamatan babulu kabupaten penajam paser utara Kalimantan.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi perubahan sumber prekonomian dengan cara merubah perkebunan menjadimkebut sawit.	Adanya pengurangan tingkat kesejahteraan dan tingkat pemberdayaan masyarakat untuk menggunakan tanah secara optimal..
Bambang paramudya Universitas Mulawarman (2013).	Efek pembukaan lahan terhadap karakteristik biofisik gambut pada perkebunan kelapa sawit di kabupaten bengkalis	Program PNPM Mandiri yang dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan, sehingga di Kelurahan Sidodadi, Samarinda lebih memfokuskan pada kegiatan ekonomi.	Fokus dari pelaksanaan program ini lebih pada penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi kreatif untuk mewujudkan masyarakat yang terampil.

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2015.

Berdasarkan penjelasan tabel di atas bahwa penelitian terdahulu menjelaskan mengenai kegiatan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti. Penelitian terdahulu merupakan bahan informasi dasar untuk peneliti mengenai orientasi penelitian sebagai dukungan atau landasan pembandingan dari hasil penelitian.

Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya. Titik pembeda menjadi penting dijadikan sebagai dasar peneliti untuk keabsahan penulisan skripsi ini. Penelitian mengenai permasalahan alih fungsi hutan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.6 Kerangka Pemikiran

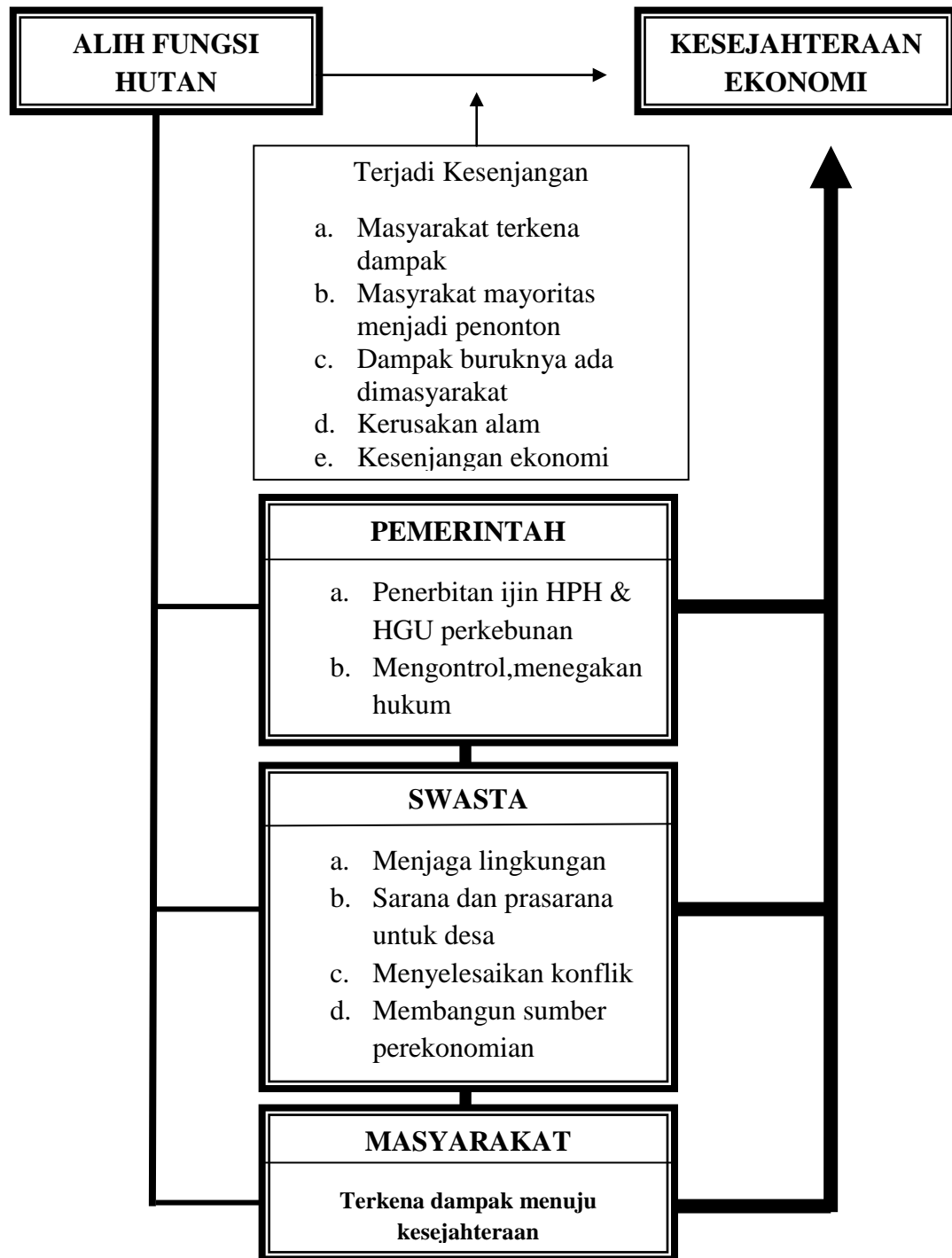
Dalam pelaksanaan penelitian peneliti menggunakan kerangka berfikir keterkaitan pihak swasta dalam alih fungsi hutan terhadap kesejahteraan masyarakat pedalaman kabupaten paser, yang berdampak langsung ke masyarakat. Peneliti mencoba membuat sebuah konsep atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian dan nantinya juga dalam menyusun laporan hasil penelitian. Kerangka penelitian ini melibatkan beberapa teori seperti teori ekonomi politik dan konsep ekologi politik.

Penyusunan kerangka pemikiran dalam penelitian ini juga bertujuan untuk tetap memfokuskan penelitian ke dalam objek kajian yang diteliti, agar bahasannya tidak melebar, sehingga mengakibatkan hasil penelitian yang sesuai dengan konsep awal penelitian. Tentang alih fungsi hutan mengapa peneliti membahas penelitian tentang alih fungsi hutan dikarenakan belum ada kajian terdahulu dalam penelitian dikabupaten paser yang membahas tentang dampak

alih fungsi hutan terhadap masyarakat adat pedalaman, Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

Hingga saat ini kebijakan pemerintah sangat terpengaruh dengan swasta yang berperan penting dalam pelaksanaan keputusan pemerintah untuk memberikan. Perijinan untuk mengalih fungsikan hutan menjadi perkebunan dan pertambangan. Yang menyebabkan masyarakat mengalami kemajuan atau mengalami kemiskinan akibat alih fungsi hutan menjadi sumber perekonomian pihak swasta. Adapun konsep pemikiran yang dirancang adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Konsep Pemikiran



Sumber : Data diolah peneliti 2015.

Peneliti menggunakan konsep pemikiran seperti diatas dikarenakan penelitian ini erat kaitannya dengan sektor swasta yang berperan penting dalam alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan pertambangan. Akan tetapi menurut penelitian keterkaitan pemerintah sebagai fasilitator dalam pembuatan perijinan pebukanaan lahan hutan. Saling berkaitan dan akibat terjadinya alih fungsi hutan berdampak langsung terhadap masyarakat. Seharusnya ada peran pemerintah untuk memberikan kejelasan pembangunan perekonomian akibat dari alih fungsi hutan kepada masyarakat yang terkena dampak. Dan memberikan pendidikan yang layak kepada masyarakat pedalaman, untuk mendukung kenaikan tingkat kesejahteraan haruslah ada peran pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Apabila ketiga faktor ini berjalan dengan seimbang. Terjadilah sumber – sumber perekonomian yang baru dan membuat jaminan kesejahteraan sendiri untuk masyarakat adat pedalaman Kabupaten Paser, Kalimantan timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data digunakan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, lebih menekankan makna dari generalisasi.⁴¹ Penelitian ini juga menggunakan penjabaran secara deskriptif, yang intensif, terperinci, dan mendalam dalam mencari sumber data yang ada, mengenai alih fungsi hutan terhadap kesejahteraan masyarakat pedalaman subjek yang menjadi bahan penelitian menggunakan pendekatan ekonomi politik dan ekologi politik yang berlokasi di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Menurut Creswell, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi tersebut yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata

⁴¹ Sugiono 2012. Memahami penelitian kuantitatif. Bandung: alfabeta. Hal 2

atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema.⁴²

Pendapat Lincoln pendekatan kualitatif dapat disebut juga dengan *case study* atau *qualitative*, yang merupakan penelitian yang mendalam serta mendetail tentang sesuatu yang berhubungan secara langsung dengan subyek penelitian. Pendapat dari Moh Surya menyatakan studi kasus dapat dianggap sebagai suatu teknik yang mempelajari individu secara mendalam untuk memperoleh penyesuaian diri.⁴³

Penelitian kualitatif lebih diarahkan pada metode studi kasus. Studi kasus ini dapat membantu peneliti untuk mendalami tentang perorangan, kelompok, program, organisasi, budaya, agama, daerah atau bahkan Negara. Pemahaman kasus khusus yang terjadi di masa lampau akan membantu pribadi, komunitas maupun masyarakat untuk mengatasi suatu masalah yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Dengan metode ini peneliti bertujuan melihat suatu kasus secara keseluruhan serta peristiwa nyata untuk mencari ciri khasnya.⁴⁴

Menurut Lincoln penggunaan studi kasus sebagai metode penelitian kualitatif mempunyai beberapa keuntungan, yakni:⁴⁵ Pertama, Studi kasus dapat memberikan pandangan dari subyek yang diteliti. Peneliti dapat merasakan dampak secara langsung yang ada di lapangan. Kedua, Studi kasus memberikan uraian secara lengkap yang mirip dengan yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari.

⁴² Conny. R. Semiawan. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. Hal:7.

⁴³ Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. hal 117

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 50

⁴⁵ *Ibid.* Hal 64.

Ketiga, Studi kasus merupakan sarana yang tepat untuk menghubungkan antara peneliti dengan responden. *Keempat*, Studi kasus dapat memberikan pandangan dengan mengembangkan uraian yang mendalam untuk dijadikan sebagai penilaian.

Dalam penelitian ini apabila didasarkan pada sifat dan tujuan penelitian, maka penelitian dalam meneliti permasalahan dampak alih fungsi hutan Terhadap kesejahteraan masyarakat ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Dengan mendeskripsikan suatu fenomena, yang ada di dalam lapangan. Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik, fakta-fakta, dan menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi.⁴⁶ Selain itu dengan pendekatan studi kasus merupakan pendekatan untuk membantu peneliti lebih mendalami suatu masalah dari wilayah tertentu.

Untuk memperoleh data yang valid, selanjutnya penelitian ini langsung melakukan pengamatan secara mendalam terhadap pihak yang terkait serta langsung mewawancarai perangkat yang terhubung dalam kegiatan tersebut agar mengetahui.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan lokasi yang dipilih dari peneliti ini berlokasi di Kecamatan Paser Belengkong dan Kecamatan Muara Komam dan penelitian tefokus di Desa Perepat, Desa Laburan, Desa Sunge Batu dan Desa Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Alasan mengapa analisisnya menggunakan lokasi ini untuk dijadikan bahan

⁴⁶ Rianto, Adi.2008. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. Hal.7.

penelitian dikarenakan belum adanya penelitian atau publikasi mengenai alih fungsi hutan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dikarenakan kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan keadaan alam seharusnya dan banyak tindak kejahatan hutan yang dilakukan pihak swasta tanpa ada kontroling yang intensif dari pemerintahan⁴⁷.

Melihat fenomena tersebut, mendorong kegiatan penelitian lebih memilih Daerah ini untuk dijadikan bahan kajian, apalagi melihat permasalahan yang terjadi di Desa Muara Komam Kecamatan Batu Kajang, dan Desa Perepat, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Di Daerah tersebut banyak terjadi kaitannya dengan kegiatan-kegiatan politisasi. Sehingga dengan alasan tersebutlah mengapa penelitian ini lebih memilih untuk menggunakan tema alih fungsi hutan terhadap kesejahteraan masyarakat pedalaman.

Untuk memperoleh data yang valid, selanjutnya penelitian ini langsung melakukan pengamatan secara mendalam terhadap pihak yang terkait serta langsung mewawancarai perangkat yang terhubung dalam kegiatan tersebut untuk mengetahui mengapa pihak swasta melakukan alih fungsi hutan di Daerah Kecamatan Paser Belengkong, Desa Perepat, Kalimantan Timur.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini peneliti mengadakan penelitian di lokasi Desa Perepat, Desa Laburan, Desa Sunge Batu dan Desa Muara Komam, di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Peneliti mengadakan penelitian dikarenakan adanya

⁴⁷ Ibid 45

permasalahan kesejahteraan yang diakibatkan oleh pihak swasta, yang mengalih fungsikan hutan menjadi perkebunan dan pertambangan penulis mengambil data di Desa Laburan dan Muara Komam⁴⁸.

Dikarenakan penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah maupun data yang akan dikumpulkan dan diolah untuk kemudian dianalisis. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi dan menentukan sasaran penelitian dapat mengklasifikasikan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisa dalam suatu penelitian sehingga mempertajam bahasan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Moleong bahwa terdapat dua maksud yang ingin dicapai peneliti dalam menetapkan fokus penelitian. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan.⁴⁹

3.4 Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang dapat diperoleh dalam menentukan pengumpulan data pada satu penelitian, data primer dan data skunder adapun penjelasan mengenai jenis data sebagai berikut :

3.4.1 Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang didapat adalah berupa wawancara dari narasumber, kegiatannya langsung berhubungan dengan penelitian serta mampu memberikan informasi yang relevan dan berkompeten bagi penelitian. Sumber Data Primer, Sumber Data Sekunder menggunakan *purposive* yaitu

⁴⁸ Ibid 41

⁴⁹ Moleong, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya. Hal 116.

informan yang diseleksi. Dengan dasar kriteria-kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu informan yang diwawancarai Informan kunci yang tepat dalam memberikan informasi, data dan dan akurasi data. mengenai alih fungsi hutan terhadap kesejahteraan masyarakat adat pedalaman. Di Kabupaten Paser yaitu informan kunci adalah Dinas yang terkait Dinas Pertanahan, Kepala Desa, Perusahaan Swasta, Kepala Adat/Suku dan informan tambahan Masyarakat terkena dampak akibat alih fungsi hutan⁵⁰.

Informan penelitian ini dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Inggong : Inggong adalah selaku Ketua Adat di tiga desa tersebut ya itu mencakup Desa Laburan Desa Sunge Batu dan Desa Perepat. Peran Kepala Adat dalam alih fungsi hutan adalah kepala adatlah yang berperan mengambil keputusan wilayah mana saja yang harus diganti tanam tumbuhnya akibat alih fungsi hutan yang dulunya adalah perkebunan milik masyarakat pedalaman Desa Laburan Sunge Batu dan Desa Perepat. Kepala Adatlah yang membantu pemerintah dalam menetapkan batas batas di lokasi pembukaan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.
- b. Hardianto : Hardianto adalah selaku sebagai Kepala Desa Sunge Batu yang membantu menyelesaikan permasalahan antara perusahaan dan masyarakat. Akibat alih fungsi hutan, kepala desa juga berperan dalam penerbitan surat surat keterangan tanah SKT. Dan kepala desa memperjuangkan hak atas kekurangan masyarakat desa seperti kebun plasma, perusahaan harus memberikan kepada desa dan masyarakat.

⁵⁰ Observasi Langsung di Kabupaten Paser, 2016

- c. Kaharudin : Kaharudin selaku sebagai Kepala Desa Laburan yang membantu menyelesaikan permasalahan antara perusahaan dan masyarakat. Akibat alih fungsi hutan, kepala desa juga berperan dalam penerbitan surat surat keterangan tanah SKT. Dan kepala desa memperjuangkan hak atas kekurangan masyarakat desa seperti kebun plasma, perusahaan harus memberikan kepada desa dan masyarakat. menuntut pihak perusahaan agar memberikan solusi akibat pembukaan hutan seperti permasalahan debu dan tenaga kerja
- d. Nurdiansyah : Nurdiansyah selaku sebagai masyarakat dan kaur pemerintahan desa Laburan. terdampak akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan. Nurdiansyah mengeluhkan susah nya pasokan air bersih untuk masyarakat karena sumber sumber mata air yang selama ini menjadi sumber telah kering akibat hutan adat mereka juga ikut teralih fungsi. Nurdiansyah berperan dalam permohonan bantuan kepada pemerintah dan perusahaan untuk membantu membuatkan jaminan pasokan air bersih untuk masyarakat.
- e. Abdul azis : Abdul Azis selaku sebagai petani dan nelayan merasakan akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan. Abdul azis mengeluhkan karena hak yang dijanjikan perusahaan sawit sampai hari ini belum diberikan. Padahal sudah 6 tahun perusahaan sawit membuka perkebunan tetapi masyarakat belum juga diberikan perkebunan plasma.
- f. Ratia puspa : Ratia Puspa selaku sebagai manajer PT. Putra Guru Pasir yang melakukan *land clearing* hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Keterangan dari Ratia Puspa adalah kurangnya komunikasi dan penyampaian yang baik antara perusahaan, masyarakat. Sehingga sering terjadi permasalahan lahan dimana masyarakat merasa dirugikan.

- g. Pompon : Pompon selaku masyarakat desa berkerja sebagai petani. Keterangan dari pompon dalam alih fungsi hutan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dikarenakan. Masyarakat belum mendapatkan kebun plasma yang dijanjikan pihak perusahaan. Akan tetapi masyarakat di desa laburan kurang mengerti bagaimana cara mengurus untuk mendapatkan kebun plasma. Popon berperan sebagai penggerak masyarakat untuk meminta penyiraman jalan. Akibat lalu lalang kendaraan berat perusahaan.
- h. Rusmadi : Selaku BPD Desa Sunge Batu menyatakan bahwa dampak dari konversi hutan menjadi pertambangan dan perkebunan ada baik dan buruknya dari segi budaya maupun dari segi ekonomi. Saat ini setelah terjadinya konversi hutan masyarakat banyak mengalami kemajuan untuk didesa dibandingkan sebum adanya perusahaan masuk kedesa untuk membuka ertambangan dan perkebunan.
- i. Bapak Mardi : Selaku masyarakat menyatakan bahwa dampak dari alih fungsi hutan itu ada sisi baik dan buruk. Salah satu Pelaku alih fungsi harusnya tidak merusak sumber ekonomi masyasarakat, seharusnya perusahaan melestarikan kearifan lokal dan melestarikan sumber ekonomi dari hasil hutan. Inilah realita di lapangan dulunya ada musim buah - buahan hutan, seperti buah lahung durian merah, cempedak, elai, dan

angrek - angrek, fauna asli Kalimantan seperti monyet bekantan, beruang madu, burung enggang, dan ular, buaya, macan dahan, telah hilang akibat pembukaan hutan beralih fungsi menjadi perkebunan, telah merusak flora dan fauna alam sekitar sebaiknya ada peran pemerintah meminta pada perusahaan untuk menyisakan hutan untuk tinggal hewan hewan yang tersisa.

Hasil wawancara diatas dari berbagai narasumber, kegiatannya langsung berhubungan dengan penelitian serta memberikan informasi yang relevan dan berkompeten bagi penelitian Berkaitan dengan, *deforestasi* untuk memajukan suatu desa melalui konversi hutan menjadi perkebunan dan pertambangan.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder ditulis untuk mendukung data primer. Data sekunder dapat berupa buku, dokumen-dokumen, jurnal, *website* dan lain sebagainya. Data diperoleh tidak secara langsung berhubungan dengan responden.

3.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan *purposive* yaitu informan yang diseleksi dengan dasar kriteria-kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu informan yang diwawancarai. Informan yang dipilih dalam penelitian ini lingkupnya ada yang berada didalam lokasi penelitian dan ada di luar lokasi penelitian terbagi menjadi beberapa informan yaitu :

- a. Ada beberapa kereteria Informan kunci yang tepat dalam memberikan informasi, data dan dan akurasi data menegnai alih fungsi hutan terhadap

kesejahteraan masyarakat adat pedalaman. Di Kabupaten Paser yaitu informan kunci adalah dinas yang terkait seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pertanahan, Kepala Desa, Perusahaan Swasta, Kepala Adat/Suku. Yang terkena dampak akibat alih fungsi hutan.

- b. Pengambilan data untuk informan utama melalui masyarakat, yang berada di tiga Desa Laburan, Perpat, Sunge Batu dan Desa Muara Komam agar penelitian ini benar adanya yang terjadi dilapangan.
- c. Peneliti menggunakan informan pendukung sebagai penunjang untuk mencari data seperti pengambilan data dari LSM, media masa, buku, dan masyarakat yang berada diluar desa penelitian⁵¹.

3.5.1 Akses dan Hubungan dengan Informan

Penelitian ini berawal pada ketertarikan pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam penerbitan ijin dan pembukaan alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Yang sangat erat kaitanya dengan perekonomian masyarakat pedalaman, terkena dampak akibat hutan alam mereka telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan.

Berdasarkan alasan dari beberapa hal tersebut, maka peneliti mempunyai gambaran informan yang akan dicari nantinya untuk mendapatkan data, mengenai alih fungsi hutan terhadap kesejahteraan masyarakat pedalaman, Kalimantan Timur Kabupaten Paser di Kecamatan Batu Kajang desa Muara Komam dan Kecamatan Paser belengkong, Desa Perepat.

⁵¹ Ibid 78

Peneliti akan mengadakan pengambilan data dengan masyarakat, pihak swasta dan pemerintahan yang terkait. dengan menunggu surat izin dari fakultas, serta menunggu persetujuan dari dosen pembimbing mengenai persetujuan proposal ini, maka informan yang akan dilibatkan dalam penggalan data ini adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang mempertahankan hutan alam mereka dan masyarakat yang telah ber alih fungsi hutan mereka menjadi perkebunan kelapa sawit. Dan bagaimana dampak ke masyarakat akibat pembukaan hutan dan eksploitas tambang yang terjadi di Desa Muara Komam dan Desa Perepat.
- b. Kepala adat desa sebagai nantinya sebagai informan penelitian ini mengapa membiarkan hutan desa nya beralih fungsi.
- c. Dari pihak swasta memberikan penjelasan mengapa membuka lahan secara besar besaran tanpa mempertimbangkan dampak akibatnya terhadap masyarakat pedalaman Kabupaten Paser.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah cara yang paling mudah dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan kualitas data yang baik sesuai dengan ketentuan yang ada menjadi berdasarkan data yang diperoleh, yaitu:

3.6.1 Wawancara Mendalam (*Depth Interview*)

Wawancara ialah alat pengumpul data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dikatakan penting karena melibatkan manusia sebagai subjek

(pelaku, aktor) sehubungan dengan realitas atau fenomena yang dipilih untuk diteliti⁵². *Depth interview* adalah cara mengumpulkan data terhadap informan secara langsung dengan bertatap muka agar memperoleh data lebih lengkap serta mendalam. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Adat, Kepala Desa, masyarakat. Peneliti mendapatkan data dengan jelas atas keterangan narasumber proses tersebut dilakukan dengan cara sistem Tanya jawab dan bertatap muka secara langsung antara peneliti dan narasumber.

Penggunaan *Depth interview* ialah untuk melengkapi bentuk struktur dari kata yang ditelaah, caranya yaitu melalui pengajuan beberapa pertanyaan kunci kepada informan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau tanggapan dari kajian yang diteliti. Oleh karena itu, *depth interview* akan menghasilkan data yang sifatnya mendalam. Pertanyaan dalam penelitian ini hanya beberapa pertanyaan kunci yang sudah disiapkan dari *interview guide* dan akan membiarkan berbagai pertanyaan lanjutan untuk memperdalam data yang akan mengalir dengan sendirinya.

Secara praktiknya di lapangan, juga disuguhkan pertanyaan seputar lingkup penelitian yang ditujukan pada responden utama. Untuk memperoleh validitas data, tentunya juga dilakukan usaha untuk memperoleh tanggapan atau jawaban mendetail dari setiap pertanyaan yang diutarakan. Penelitian ini akan melakukan pengembangan-pengembangan dari *interview guide* yang ada, hal ini dilandasi pada jawaban yang diberikan responden. Pelaksanaan penelitian ini tidak hanya berkiblat pada *interview guide* yang ada tapi juga mengikuti alur dan

⁵² Pawito, 2007. Membahas tentang *Penelitian Ilmu Politik Kualitatif*. Yogyakarta. Pelangi Aksara. Yogyakarta, hlm. 132.

kondisi pembicaraan dari pihak responden. Pelaksanaannya juga mengupayakan hasil yang diperoleh dari wawancara sifatnya jujur⁵³. Proses wawancara ini dikemas dalam suasana santai dan tidak terlalu formal, tujuannya adalah agar dapat menimbulkan kedekatan emosional antara kedua belah pihak.

3.6.2 Observasi

Observasi adalah peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, dikatakan bahwa observasi merupakan keterlibatan peneliti dengan kegiatan sehari-hari pada subjek penelitian, terbagi menjadi empat yaitu :

a. Partisipasi pasif

Dalam hal ini peneliti datang ditempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

b. Partisipasi Moderat

Observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya.

c. Partisipasi aktif

Peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap.

d. Partisipasi lengkap

⁵³ Ibid 34

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data.

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian alih fungsi hutan terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan Kalimantan Timur, Kabupaten Paser, Kecamatan Batu Kajang, Desa Muara Komam dan Kecamatan Paser Belengkong, Desa Perepat. maka peneliti menetapkan menggunakan teknik observasi aktif sebagai penunjang terkumpulnya data secara lengkap. Peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber tetapi belum sepenuhnya lengkap. Seperti peneliti melakukan penelitian langsung kelapangan untuk melihat bagaimana terjadinya alih fungsi hutan di Desa Perepat, Sunge Batu, dan Desa Laburan. hutan yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan.

3.6.3 Dokumentasi

Metode ini dipilih untuk menunjang fakta-fakta lapangan yang ditemui dalam proses penelitian. Adapun bentuk dari metode kajian dokumen dalam penelitian ini adalah arsip atau dokumen Keterangan masyarakat di kabupaten paser. Hasil penelitian juga akan menjadi kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademis dan kenyataan yang telah ada.

3.7 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis data yang dikenakan ialah teknik analisis Miles dan Huberman⁵⁴, yang sifatnya interaktif. Analisis interaktif ini terdiri dari komponen-komponen tertentu, yaitu:

⁵⁴ Hubberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru, Jakarta. hlm. 16-19.

- a. Reduksi data, ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data besar yang muncul dari catatan-catatan tertulis sesuai fokusannya. Reduksi data secara terus menerus berlangsung selama penelitian berlangsung. Reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, hingga laporan akhirnya. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan memstrukturalisasikan data sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat dijumpai.
- b. Penyajian data, ialah sekumpulan informasi tersusun secara runtut sehingga mempermudah untuk melihat visualisasi secara umum dan memberi kemungkinan untuk mengadakan pengambilan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, maka harapannya dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Penyajian data yang sering digunakan pada data penelitian kualitatif adalah bentuk teks naratif.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu kegiatan menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokan dari makna yang muncul dari data penelitian. Kesimpulan-kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan dan keahlian.

3.8 Triangulasi Data

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data sebagai teknik pengumpulan data dan penjelasan triangulasi data dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat dari berbagai teknik pengumpulan data yang ada⁵⁵. Dan triangulasi dalam pengujian kredibilitas dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu⁵⁶ berkaitan dengan alih fungsi hutan terhadap kesejahteraan masyarakat adat pedalaman. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Dengan menggunakan bahan referensi yang menjadi pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti. Yaitu data hasil dari wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara, suatau keadaan yang terjadi perlu didukung dengan foto – foto yang terjadi dilapangan, dalam penelitian kualitatif seperti camera, handycam, alat rekam suara sangat dibutuhkan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.

⁵⁵ Sugiono. 2009. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta bandung hal 241

⁵⁶ Sugiono. 2012. Memahami penelitian kuantitatif. Alfabeta bandung. Hal 129

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Profil Hutan Dan Alih Fungsi Hutan Di Kabupaten Paser

Kabupaten Paser merupakan wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang terletak paling selatan, tepatnya pada posisi 00 45"18,37" – 20 27"20,82" LS dan 1150 36"14,5" -1660 57"35,03" BT. Kabupaten Paser terletak pada ketinggian yang berkisar antara 0 – 500 m di atas permukaan laut. Luas Wilayah Kabupaten Paser saat ini adalah 11.603,94 km², terdiri dari 10 Kecamatan dengan 106 buah Desa/Kelurahan dan empat buah UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi), serta dengan jumlah penduduk pada tahun 2003 mencapai 172.608 jiwa, atau memiliki kepadatan penduduk 15 jiwa/Km². Kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Paser adalah Kecamatan Long Kali, dengan luas wilayah 2.385,39 km², termasuk di dalamnya luas daerah lautan yang mencapai 20,50 persen dari luas wilayah Kabupaten Paser secara keseluruhan, sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot, yang mencapai 33,58 Km² atau 2,89 persen⁵⁷.

Dari segi konstelasi regional, Kabupaten Paser berada di sebelah Selatan Propinsi Kalimantan Timur. Posisinya dilintasi oleh jalan arteri primer (jalan negara/nasional) yang menghubungkan Propinsi Kalimantan Timur dengan

⁵⁷ BAPPEDA Paser Bidang Sosial Ekonomi, 2015

Kalimantan Selatan. Pada bagian timur Kabupaten Paser melintang selat Makassar, yang dimasa yang akan datang memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran internasional.

Pelabuhan laut utama di Kabupaten Paser, yaitu Pelabuhan Teluk Adang terletak 12 Km ke arah utara ibukota Kabupaten (Kota Tanah Grogot), sedangkan Kota Tanah Grogot berjarak lebih kurang 145 Km dari Kota Balikpapan, atau 260 Km dari Ibukota Propinsi Kalimantan Timur (Kota Samarinda)⁵⁸. Dibawah ini adalah data letak geografis Kabupaten Paser berbatasan dengan daerah – daerah lain :

Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015

Letak	00 45'18,37* - 20 27'20,82' Lintang Selatan dan 1150 36'14,5" – 1660 57'35,03' Bujur Timur
Batas	Utara Kabupaten Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara Timur Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Selat Makasar Selatan Kabupaten Kota Baru Propinsi Kalimantan Selatan. Barat Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Luas	Darat 10 851,18 Km ² Laut 752,76 Km ²

Sumber : Bappeda Kabupaten Paser Tahun 2015

⁵⁸Data Bappeda Bidang Sarpras, desember 2015.

kabupaten Paser, terutama pada desa yang dijadikan tempat penelitian kali ini. Sedangkan gambar diatas menunjukkan tentang pembagian kawasan untuk yang berwarna ungu merupakan kawasan dari cagar alam. Keadaan cagar alam saat ini sangat memperhatikan dikarenakan kawasan cagar alam telah beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan dan tambak dipesisir sungai. Hutan produksi terbatas ditunjukan pada kawasan berwarna hijau muda, hutan lindung ditunjukan pada gambar berwarna hijau muda terang, hutan produksi pada gambar peta kawasan berwarna kuning muda, dan tanaman hutan raya berwarna ungu muda, sedangkan kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) berfungsi sebagai kawasan berwarna putih dapat dipergunakan untuk kawasan bebas untuk beralih fungsi menjadi perkebunan, pemukiman, dan pertambangan.

Alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan karet serta kegiatan pertambangan adalah salah satu pendorong kerusakan hutan di Kalimantan Timur, Kabupaten Paser. Berdasarkan data dari Kabupaten Paser dalam Angka pada Tahun 2015, diketahui bahwa terjadi penurunan luas hutan mencapai 22% dan meningkatnya luas perkebunan mencapai mencapai 2 kali lipat, pembukaan lahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya⁵⁹.

Dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto PDRB, kemampuan pemerintah Kabupaten Paser dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dimilikinya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2015, angka PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku ADHB sebesar 17,65 Triliyun rupiah. Sedangkan pada tahun 2013, angka PDRB Kabupaten Paser

⁵⁹Bapeda Paser peta perkebunan, pertambangan, dan kawasan hutan 2015

ADHB mencapai 18,95 Triliyun. Namun seperti kita ketahui bersama, besarnya nilai PDRB Kabupaten Paser tersebut disebabkan oleh karena besarnya nilai kontribusi yang diberikan oleh sektor Non Migas yakni sektor pertambangan batu bara. Sedangkan jika kita lihat PDRB Kabupaten Paser sesungguhnya jika tanpa sektor non migas tersebut.

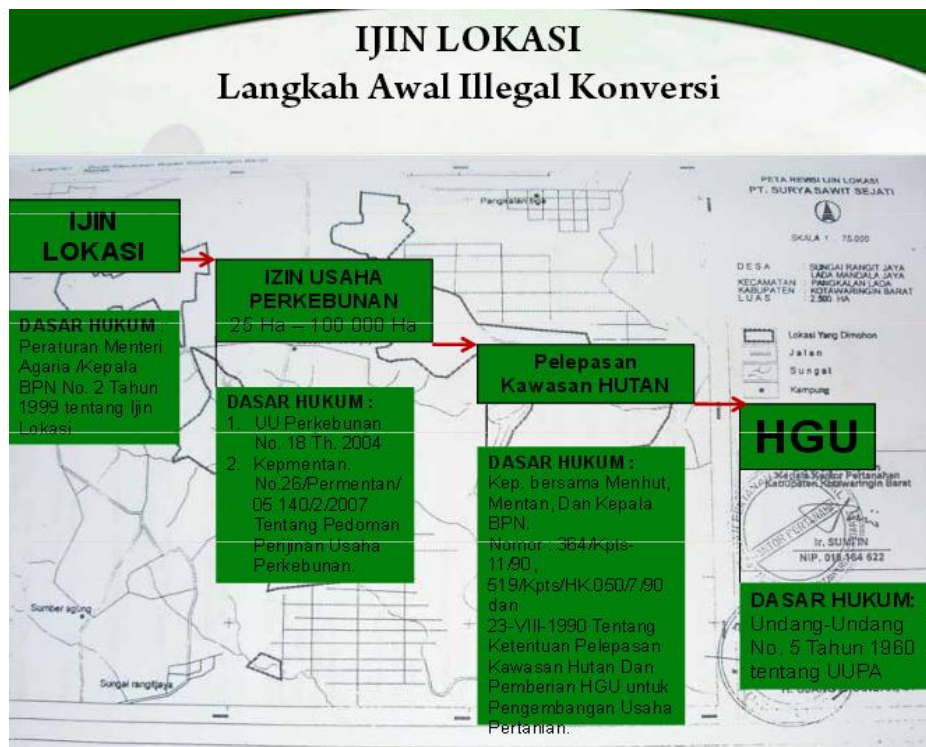
Dalam kurun lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Paser masih di dominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang diikuti oleh sektor pertanian. Dua sektor utama di atas adalah merupakan sektor primer. Kontribusi sektor primer terhadap perekonomian Kabupaten Paser dari tahun 2010 – 2015 secara berurutan adalah sebagai berikut 87,28 persen, 89,03 persen, 89,94 persen, 89.73 dan 88.37 persen. Dengan demikian, untuk dapat meningkatkan nilai PDRB maka perkembangan sektor primer harus terus diperhatikan⁶⁰.

Dalam melaksanakan pembangunan sub sektor perkebunan yang merupakan bagian integral dari sektor pertanian dan lanjutan dari. Pembangunan sebelumnya mempunyai tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani perkebunan. Pengembangan usaha di sektor perkebunan secara tidak langsung juga turut serta membuka kesempatan kerja baru bagi para pencari kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut pengembangan usaha di sektor perkebunan dilaksanakan melalui usaha peremajaan *replanting*, intensifikasi, ekstensifikasi, maupun diversifikasi dengan pola pengembangan seperti pola swadaya/parsial, perkebunan inti rakyat dan perkebunan besar swasta atau milik negara.

⁶⁰BAPPEDA Paser Bidang Sosial Ekonomi, 2015

Diberikannya perijinan untuk membuka hutan menjadi perkebunan untuk perusahaan yang ingin berinvestasi dengan cara melakukan, memenuhi persyaratan seperti gambar dibawah ini :

Gambar 4.2 Langkah Awal Illegal Konversi



Sumber: Abetnego Tarigan, 2010,⁶¹

Pembangunan kehutanan pada hakekatnya mencakup semua upaya pemanfaatan dan pemantapan sumberdaya alam hutan beserta ekosistemnya, baik berfungsi sebagai pelindung dan penyangga kehidupan maupun sebagai pelestarian keanekaragaman sumberdaya hayati yang nanti mampu menjadi sumber ekonomi bagi pembangunan. Namun dalam realitanya tiga fungsi utamanya sudah hilang, yaitu fungsi ekonomi jangka panjang, fungsi lindung dan estetika sebagai dampak kebijakan pemerintah. Hilangnya ketiga fungsi di atas

⁶¹Lihat *Persoalan di Balik Alih Fungsi Hutan*. Sawitwatch.or.id. download. Pdf. Pukul 20.00 wita

mengakibatkan semakin luasnya lahan kritis yang diakibatkan oleh pengusahaan hutan yang tidak mengindahkan aspek kelestarian.

Pada tahun 2007, produksi kehutanan berupa kayu bundar di Kabupaten Paser mengalami peningkatan sebesar 19.60 persen dibandingkan tahun 2006. Tahun 2006 produksi kayu bundar kabupaten paser sebanyak 169.817.01 M3 dan tahun 2007 meningkat menjadi 203.097.29 M3. Selain produksi kayu bundar, produksi kehutanan lainnya adalah jenis rotan dan sirap. Tahun 2007, produksi rotan kabupaten paser mencapai 207.842.60 M3 dan sirap sebanyak 180.000.00 M3⁶².

Efek selanjutnya adalah semakin menurunnya produksi kayu hutan non HPH, sementara upaya reboisasi dan penghijauan belum optimal dilaksanakan. Masalah lain yang sangat merugikan tidak saja Kabupaten Paser pada khususnya, tapi Indonesia pada umumnya masalah *illegal logging* dan pembukaan hutan dari perusahaan perkebunan membuka lahan diluar luasan wilayah⁶³.Dibawah ini adalah gambar perusahaan mengambil kayu asal Kalimantan sejak tahun 1985 – 2016 :

⁶² Sumber : Badan Statistik Kabupaten Paser Kalimantan timur tanggal, 23 april 2016

⁶³ Sumber : Sumber : Data BAPPEDA Paser Bidang Sosial Ekonomi, 2015

Gambar 4.3 Truck pengangkut kayu bulat dari dalam hutan menuju pelabuhan.



Sumber : Dokumentasi peneliti, truck logging mengangkut kayu dari dalam hutan tgl 8 feb 2016

Dari gambaran diatas sudah berapa juta pohon yang ditebang tiap tahunnya untuk kebutuhan pembangunan diperkotaan. Pembangunan kehutanan pada hakekatnya mencakup semua upaya memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber daya alam hayati lain serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung dan penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya pembangunan.

Masalah lain yang sangat merugikan tidak saja Kabupaten Paser pada khususnya tapi Indonesia pada umumnya adalah masalah *illegal logging*. Masalah ini merupakan akar dari masa lalu yang sulit sekali untuk diberantas. Luas hutan Kabupaten Paser tahun 2012, sekitar 1.024.845 Ha dengan rincian 114.518 hutan lindung, 96.641 hutan suaka alam dan wisata, 168.091 hutan produksi terbatas, 238.752 produksi tetap, dan 406.843 hutan tetap.

Hak Pengusahaan Hutan HPH adalah hak untuk mengusahakan hutan didalam suatu kawasan hutan produksi yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan, berdasarkan ketentuan-ketentuan yg berlaku serta berdasarkan azas kelestarian. Di Kabupaten Paser, pada tahun 2012 terdapat perusahaan pemegang HPH dengan luas hutan 378.830 Ha⁶⁴.

Sedangkan Hutan Tanaman Industri HTI adalah usaha hutan tanaman untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur sesuai dengan tapaknya (satu atau lebih sistem silvikultur) dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan kayu maupun non

⁶⁴Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur 2015

kayu. Jika pada tahun 2011 di Kabupaten Paser tidak terdapat perusahaan pemegang HTI, maka pada tahun 2012 di Kabupaten Paser terdapat 2 perusahaan pemegang HTI dengan luas pengusahaan 30.600 Ha tidak ada lagi perusahaan HTI⁶⁵. Hingga saat ini perusahaan kayu hutan tanaman industri (HTI) tetap menjalankan alih fungsi hutan yang kebanyakan hutan yang dialih fungsi dikawasan budidaya kehutanan (KBK) perusahaan HTI mendapatkan keuntungan berkali lipat. Dimana kawasan budidaya kehutanan terdapat pohon pohon kayu besar yang sangat ekonomis. Dibawah ini gambar jalan blok pengambilan kayu menuju penebangan hutan kayu bundar :

Gambar 4.4 Jalan Blok Pengambilan Kayu



Sumber :peneliti mendapatkan gambar saat melakukan penelitian tanggal 13 desember 2015

⁶⁵ Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur 2015

Hal ini berakibat pada hilangnya kemampuan daya serap hutan terhadap karbon mencapai 10 juta ton per tahun. Adanya perubahan peruntukan lahan ini sangat bertentangan dengan prinsip penyelamatan lingkungan hidup dan hutan di tengah meningkatnya bencana ekologis seperti banjir besar tiga kali setahun, kebakaran lahan mengakibatkan asap dan meningkatnya rawan bencana di kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Luasan hutan yang terdapat di desa sunge batu perepat dan desa laburan mencapai 15000 hektare dari keseluruhan luasan desa berubah menjadi perkebunan. Dan berdampak baik menurut hasil dari penelitian ini peneliti melihat banyak perkembangan akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan di desa laburan dan desa sunge batu.

4.1.2 Profil Masyarakat Adat Pedalaman Sebelum dan Sesudah Alih Fungsi Hutan di Kecamatan Paser Belengkong dan Kecamatan Muara Komam

Desa laburan merupakan salah satu desa terpencil di arah utara dari kota Tana Paser di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Dalam penelitian ini yang ingin diketahui ialah kesejahteraan yang terletak di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Paser Belengkong memiliki jumlah desa sebanyak delapan desa. dan Kecamatan Muara Komam memiliki jumlah desa sebanyak tujuh desa. Pada penelitian yang berlangsung di Kecamatan Paser Belengkong di desa laburan dan desa sunge batu, mayoritas suku penduduk desa Paser Belengkong ialah suku Dayak Bentian juga Dayak Paser dan mayoritas suku di Kecamatan Muara Komam ialah suku Dayak Paser juga suku Banjar. Keadaan penduduk sebelum

terjadi konversi hutan (*deforestasi*) untuk industri kayu, pertambangan dan perkebunan dampak yang dirasakan masyarakat adalah :

- a. Terdapat banyak Tumbuhan endemik Kalimantan.
- b. Terdapat banyak hewan endemik Kalimantan.
- c. Terjaganya kearifan lokal desa.
- d. Hasil rotan, getah dammar dan kayu garu mudah didapatkan.
- e. Tidak terjadi kekeringan saat musim kemarau.
- f. Tidak ada kebakaran hutan.
- g. Tidak ada illegal logging.
- h. Tidak ada sekolah.
- i. Tidak ada jalan penghubung antar desa.
- j. Tidak ada jembatan penghubung desa.
- k. Terjaganya kandungan air sungai.

Keterangan diatas menjelaskan tentang keadaan desa penelitian ini berlangsung sebelum adanya pembukaan hutan. Setelah adanya keputusan pemerintah untuk pemanfaatan lahan kosong/ hutan kepada pihak swasta. Diluar kawasan hutan lindung, cagar alam pemerintah meminta perbaikan keadaan desa dan membentuk sumber perekonomian. Setelah terjadinya Konversi hutan menjadi industri kayu, pertambangan, dan perkebunan dampak yang dirasakan masyarakat dan pemerintah adalah :

- a. Hilangnya tumbuhan endemik Kalimantan
- b. Hilangnya hewan endemik Kalimantan
- c. Berkurangnya kesadaran untuk menjaga kearifan lokal.

- d. Terjadinya kekeringan saat musim kemarau.
- e. Terjadinya kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap dan hilangnya pasokan oksigen Dunia.
- f. Terjadinya kejahatan hutan *deforestasi*.
- g. Terjadinya penebangan kayu berlebihan.
- h. Adanya pembangunan Sekolah Dasar di Desa
- i. Terbangunnya Jalan penghubung antar Desa.
- j. Terbangunnya jembatan – jembatan penghubung.
- k. Tercemarnya aliran sungai.

Penjelasan diatas menjelaskan dampak dari konversi hutan menjadi industri kayu, pertambangan dan perkebunan. Konversi hutan mengakibatkan berubanya pola kehidupan masyarakat dan berubahnya sumber kehidupan mereka. Masyarakat Adat pedalaman yang terletak Kalimantan Timur di Kabupaten Paser.

Dimulai sejak tahun tahun 2007, produk unggul sektor perkebunan kabupaten paser masih dikuasai oleh jenis tanaman perkebunan Kelapa sawit. Produksi kelapa sawit kabupaten paser tahun 2007 mencapai 653.739.780 ton. Nilai produksi ini jika dibandingkan dengan tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 9.65 persen⁶⁶. Tanaman perkebunan lain yang juga merupakan tanaman unggulan di Kabupaten Paser adalah tanaman karet. Dibandingkan tahun 2006, produksi tanaman perkebunan karet di Kabupaten Paser mengalami Tahun 2006, produksi karet kabupaten paser hanya sebanyak 6.760.820 ton dan tahun 2007 meningkat menjadi 7.339.990 ton. peningkatan sebesar 8.57 persen. Berada didua

⁶⁶Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, *data dalam bidang perkebunan* tanggal 23 april 2016

Kecamatan dan di empat Desa. Penelitian ini dilakukan oleh penulis. Di daerah Kecamatan Paser Belengkong dan Kecamatan Muara Komam. terdapat sumber daya alam sangat melimpah dari sumber daya air, tanah, batu, kayu, hutan rotan minyak bumi, batu bara dan lain lain.

Sampai saat ini banyak sumber daya alam terdapat di Daerah Kabupaten Paser. Penelitian ini membahas tentang dampak alih fungsi hutan terhadap kesejahteraan masyarakat adat pedalaman. hak atas pengelolaan hutan dan masyarakat adat yang berada didalam wilayah konversi.

Telah beralih fungsi menjadi perkebunan, pertambangan. Bila melihat perkebunan akibat kebijakan pemerintah dan investasi tidak mengenal ruang pemerintah dengan dalil mendorong pembangunan, melalui ekspansi hutan masyarakat beralih fungsi menjadi hutan industri, perkebunan kelapa sawit, dan perluasan lokasi lokasi untuk pertambangan.

Pentingnya keputusan politik dalam membuat kebijakan dalam pembenahan untuk ekonomi. Pemerintah, swasta, dan masyarakat saling bersinergi untuk mendorong perkembangan laju perekonomian mandiri. Konsep ekonomi politik dengan cara pendekatan yang bersumber dari teori ekonomi untuk memahami permasalahan – permasalahan politik.

Dalam metode analisis ekonomi politik, dimanfaatkan untuk memahami permasalahan ekonomi yang terjadi dalam suatu peristiwa⁶⁷ terjadinya alih fungsi hutan menyebabkan hilangnya sumber ekonomi masyarakat adat paser sekarang berubah menjadi perkebunan dan pertambangan. Tempat penelitian ini berkaitan

⁶⁷ Deliarnov 2006 *ekonomi politik*. Jakarta:erlangga. hlm. 16

dengan ekonomi politik, karena adanya desakan ekonomi oleh perkembangan dunia sehingga kebijakan politik berperan dalam memberikan ijin untuk *exploitasi* pembukaan hutan menjadi perkebunan dan pertambangan.

Selama ini dari turun temurun Masyarakat Adat telah mengelola sumberdaya alam berupa rotan, buah buahan hutan, pohon gaharu. Sebagai sumber penghasilan penduduk pedalaman. Hak – hak dimiliki Masyarakat Adat adalah menjalankan system pemerintahan sendiri, mengelola sumber daya alam sendiri terutama untuk kebutuhan warganya contoh : mengelola lahan hutan untuk menanam padi gunung, menanam rotan semambu, dan mengambil pohon garu. Dibawah ini adalah dokumentasi peneliti saat masyarakat mengambil rotan di hutan adat yang selama ini mereka jaga :

Gambar 4.5 Masyarakat Mengambil Rotan



Sumber : Dokumentasi penelitian masyarakat memanen rotan di desa laburan tgl 10 desember 2015.



Sumber : Dokumentasi penelitian masyarakat memanen rotan di desa laburan yang akan beralih fungsi menjadi perkebunan sawit tgl 10 desember 2015

Dari gambar diatas peneliti mendapatkan argument inti dari ekonomi adalah kelangkaan karena terjadinya peralih fungsian hutan menjadi perkebunan menyebabkan kritisnya hutan Kalimantan timur terutama kabupaten Paser.

Menyebabkan perubahan pola kehidupan masyarakat pedalaman Paser. Karena kurangnya kebutuhan pasar untuk rotan. Maka masyarakat beralih fungsi menjadi petani perkebunan sawit⁶⁸. Dimana fungsi ekonomi melayani politik banyaknya kepentingan kepentingan pemimpin politik daerah.

Memberikan perijinan untuk pembukaan perkebunan dan pertambangan di Kab. Paser merupakan salah satu dampak dari ekonomi politik menyebabkan masyarakat mengalami perubahan pola perekonomian karena adanya perusahaan memperluas kawasan perkebunan sampai ke plosok pedalaman Kalimantan. Sehingga masyarakat pedalaman mengalami desakan terhadap perkembangan. Akibat alih fungsi hutan di kabupaten paser.

4.1.3 Alih Fungsi Hutan Mengakibatkan Kesenjangan Terhadap Kesejahteraan

Alih fungsi hutan bisa di definisikan sebagai Konversi lahan hutan untuk penggunaan lahan lain untuk kepentingan kepentingan lahan pertanian dan pertambangan, kerusakan hutan bisa disebut *deforestation* mencakup lahan hutan yang dipakai untuk infrastruktur seperti bangunan, pertambangan, tempat permukiman dan perkebunan⁶⁹ Myers menyatakan bahwa penghancuran tutupan hutan secara sempurna melalui pembersihan lahan *land clearing* menyebabkan rusaknya lingkungan. Perambahan hutan pembuatan perkebunan kelapa sawit yang melebihi peta tata runag ijin perkebunan kondisi ini terjadi diseluruh pulau Kalimantan faktor yang berperan besar dalam kerusakan hutan ini yaitu :

⁶⁸Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur 2015

⁶⁹ Herman Hidayat, Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Daru dan Reformasi. Yayasan obor Indonesia ngrumat bondo utomo.tahun 2008 hal. 90

- a. Tingkah laku para politisi dan sikap mengambil keputusan didalam pemerintahan membentuk dan mendorong faktor beragam yang memberi kontribusi atas kerusakan hutan tropis.
- b. Kelengahan dalam pengawasan anantara aparat kehutanan baik dipusat dan daerah didalam menerapkan prinsip pengelolaan hutan yang lestari.
- c. Kelengahan dalam pengawasan anantara aparat kehutanan baik dipusat dan daerah didalam menerapkan prinsip pengelolaan hutan yang lestari.

Akibat pengaruh alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, pertambangan, dan pemanfaatan kayu asli hutan Kalimantan, dilakukan oleh perusahaan - perusahaan besar, terjadi mulai era 1973 kalimantan sudah diambil hasil hutannya. Kenyataan dilapangan faktor utama yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi hutan, untuk kegiatan diluar sektor kehutanan diantaranya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Perkebangan pembukaan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit baik di hutan primer maupun di hutan skunder, banyak menimbulkan masalah yang berdampak negative untuk masyarakat maupun dunia.

Pembangunan sektor perkebunan di Kalimantan Timur khususnya komoditas tanaman kelapa sawit merupakan suatu bagian integral dari pembangunan nasional, yang bertujuan mewujudkan peningkatan pendapatan petani serta meningkatkan devisa negara, selanjutnya usaha pembangunan perkebunan diarahkan pada pemerataan pembangunan. Pembangunan sektor

perkebunan terkait dengan upaya membuka kesempatan kerja, peningkatan ekspor, pemenuhan industri dalam negeri, pertumbuhan pembangunan, dan penciptaan pusat pertumbuhan wilayah ekonomi baru walaupun banyak terdapat keuntungan akan tetapi ada juga mengakibatkan dampak kerugian seperti faktor lain yang juga menjadi penyebab munculnya konflik sumberdaya alam, yaitu janji-janji kesejahteraan yang tidak terpenuhi baik dari pihak korporat/kapitalis, pemerintah/negara (*state*), dan bahkan mungkin LSM kepada masyarakat yang bermukim di sekitar sumberdaya alam⁷⁰.

Pembukaan hutan HPH (Hak Pengusaha Hutan) yang dilakukan oleh pihak swasta dan diijinkan oleh pemerintah untuk penebangan kayu secara besar besaran menggunakan mesin mesin berat. Dimulai sejak tahun 1987 di Kabupaten Paser dilatar belakangi oleh perekonomian. Alih fungsi hutan tersebut mengakibatkan dampak penebangan hutan diluar wilayah yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan swasta. Dengan cara membuat jalan ke lokasi hutan produksi yang letak lokasinya berdampingan dengan lokasi hutan lindung.

Secara tidak langsung membuka peluang untuk masyarakat mengambil kayu di lokasi hutan lindung yang sudah dilarang oleh undang undang. Masyarakat tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut adalah kawasan hutan lindung dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah ke daerah pedalaman. Pihak perusahaan turut serta dalam pengambilan kayu diluar blok lokasi perijinan. Kasus seperti keterangan diatas disebut *illegal logging* yang dilakukan masyarakat

⁷⁰ Alkhudri AT. 2012. Ekologi Politik : *Body of knowledge*, sejarah pemikiran dan perkembangan empirik terkini. *Jurnal Komunitas*. [Internet]. [dikutip 04 Nopember 2013]. 6(2): 1-15.

sekitar hutan, akan tetapi pada kenyataannya di penelitian ini masyarakat tidak mampu melakukan penebangan kayu secara besar besaran, dikarenakan masyarakat tidak akan mampu membangun jalan blok, menuju hutan lebat/produksi pengertian dari *illegal logging* adalah penebangan pohon kayu illegal secara besar besaran tanpa ada surat resmi dari pemerintah.

4.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Paser Kecamatan paser Belengkong dan Kecamatan Muara Komam

Kesejahteraan dari perekonomian sebelum terjadinya alih fungsi hutan dari hasil sumber daya alam itu yang mensejahterakan penelitian ini berkaitan dengan teori ekonomi politik Martin Staniland memberikan pandangan adanya hubungan kekuasaan yang saling menguntungkan antara sumber produksi, distribusi, dan konsumsi, adanya faktor saling menguntungkan menyebabkan antara kebutuhan produksi dan kebutuhan konsumsi manusia, menyebabkan alam terdesak dengan kebutuhan konsumsi berlebihan, dari perusahaan yang memproduksi untuk kepentingan konsumsi manusia memerlukan lahan untuk memproduksi suatu barang, lahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kertas dunia, yaitu lahan hutan kayunya diambil untuk digunakan sebagai bubur kertas, sebagai contoh semakin banyak orang didunia menggunakan kertas semakin banyak dunia kehilangan hutan, semakin sedikit hutan, akan semakin sesak manusia bernafas dibumi, maka jangan menggunakan pemakaian kertas secara berlebihan, sama dengan kita menyayangi hutan sebagai penghasil oksigen.

Pemerintah agar memberikan solusi untuk habisnya hutan hutan masyarakat telah diberikan oleh alam agar memberdayakan masyarakat lokal yang

selama ini telah menetap didalam desa. Sesudah terjadinya alih fungsi hutan. Akibat hilangnya hutan sumber perekonomian telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Masyarakat desa akan menjadi ketergantungan, kepada pemerintah, perusahaan.

Adanya perangaruh ekonomi politik dari sektor swasta, berusaha mengalih fungsikan hutan primer maupun hutan skunder, berada di Kabupaten Paser Kecaatan Pasir Belengkong, Desa Laburan, Desa Perepat dan Desa Sunge Batu. Dengan cara menggunakan aktor politik sebagai fasilitator untuk memberikan perijinan pembukaan hutan untuk pertambangan dan perkebunan tanpa memikirkan adanya masyarakat lokal yang telah bertahan hidup selama ini dengan menggunakan sumber daya alam sebagai sumber kehidupan mereka.

Peran pemeritah dalam pembangunan sektor ekonomi untuk pedesaan. Dengan menggunakan kebijakan untuk penggarapan hutan menjadi perkebunan Kelapa sawit yang terjadi di desa laburan, desa sunge batu dan desa perepat. Dalam hasil wawancara Pompon selaku masyarakat menyatakan:

“Mengalami perubahan sumber perekonomian seperti sebelumnya mendapatkan sumber ekonomi melalui hasil hutan seperti dammar, mencari pohon garu, dan rotan. Setelah terjadi alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, masyarakat desa mengalami perubahan yang cukup drastis masyarakat desa tersebut kini mendapatkan sumber perekonomian. berupa kebun sawit plasma, sebanyak 2 ha perkepala keluarga⁷¹”.

Masyarakat mulai membangun ekonomi dengan menanam pohon kelapa sawit. Rata rata Masyarakat Adat Desa Laburan, Perepat dan Sunge batu. Memiliki perkebunan kelapa sawit sebnyak 4 ha per keluarga. Ini dampak dari alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Seiring dengan menguatnya

⁷¹ Pompon, Wawancara, masyarakat Desa Laburan, pada tanggal 02 Januari 2016 pukul 13:00 WITA

harga – harga beberapa komoditas strategis di pasaran dunia, yang kemudian diikuti naiknya harga bahan bakar alternative seperti batubara dan CPO, kinerja perekonomian Kabupaten Paser pun mengalami peningkatan. Nilai nominal PDRB Kabupaten Paser atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2012 mencapai 17,84 triliun, naik 1,16 triliun dibanding tahun sebelumnya⁷².

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 dapat memberikan gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi. Dalam kurun 2008 - 2010, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Paser mengalami pertumbuhan yang positif. Namun pada tahun 2012, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Paser mencapai 8,61 persen atau mengalami perlambatan dibanding tahun 2011. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini terkait dengan pertumbuhan produksi batubara tahun 2012 tidak sebesar tahun 2011 dan tahun 2010. Melambatnya laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian ini karena penambahan produksi batubara pada tahun 2012 tidak sebanyak tahun 2011.

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah harus terus menerus dipantau. Hal ini ditujukan untuk melihat perkembangan kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan melihat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi diharapkan pemerintah dapat merencanakan dengan tepat pembangunan yang akan dilaksanakan. Sehingga bisa berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Disektor pertanian, meskipun berbagai masalah seperti penurunan produktivitas dan luas lahan disertai kondisi cuaca yang terjadi selama tahun 2012, namun sektor ini masih mengalami pertumbuhan yaitu mencapai 5,91

⁷²Data BAPPEDA Paser Bidang Sosial Ekonomi, 2015

persen. Kinerja sektor industri pengolahan, pada tahun 2012 mengalami kenaikan jika dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2011 pertumbuhan sektor industri pengolahan 6,51 persen dan pada tahun 2012 mencapai 7,30 persen. Hal ini terkait dengan meningkatnya produksi dari industri Minyak Sawit Kasar atau Crude Palm Oil (CPO) ⁷³.

Pada tahun 2012, PDRB Kabupaten Paser masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2011 kontribusi sektor ini mencapai 78,28 persen. Peningkatan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terjadi karena adanya kenaikan produksi dan harga batubara sebagai komoditas utama. Perlu diketahui bahwa penjualan komoditas batubara dihargai dengan mata uang asing, sehingga fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sangat mempengaruhi nilai tambah bruto sektor pertambangan dan penggalian. Dibawah ini gambar pertambangan batu bara yang produksi di desa batu kajang Kabupaten Paser :

⁷³Data BAPPEDA Paser Bidang Sosial Ekonomi, 2015

Gambar 4.5 Pengambilan Batu Bara di Kec. Batu Kajang



Sumber : Gambar penelitian di desa Batu kajang dan Desa Muara Komam tgl 18.feb 2016

Gambar diatas menjelaskan tentang kondisi pertambangan disalah satu Kecamatan Batu Kajang, penambangan sampai ke Desa Muara Komam sesudah penambangan pengalihan batu bara ini banyak terdapat tambang tambang batu bara. Mencapai ratusan lubang raksasa tidak ditutup lubangnya, dan tidak ada reklamasi tambang yang optimal sehingga kadungan sulfur yang terdapat di batu bara larut mencampuri aliran sungai menyebabkan, aliran sungai mendangkal dan mengandung banyak zat - zat beracun selain penggalian tambang. Alih fungsi hutan juga menjadi kebun kelapa sawit yang masih mendominasi perkebunan di Kabupaten Paser. Pada tahun 2012, luas kebun kelapa sawit di Kabupaten Paser adalah seluas 157.116 Ha. Disamping kelapa sawit masih banyak lagi jenis perkebunan, antara lain karet, kelapa, kopi, kakao, lada dan lain-lain. Luas kebun

karet di Kabupaten Paser tahun 2012 adalah seluas 12.693,50 Ha, kelapa seluas 3.725,50 Ha, kopi seluas 2.284,30 Ha dan kakao seluas 591,90 Ha, lada 148,44 Ha, dan tanaman lainnya 364,50 Ha.

Dari sisi permintaan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi didukung pula oleh kinerja ekspor dan investasi yang tumbuh tinggi, disertai konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Kenaikan harga komoditas Internasional turut menunjang tingginya pertumbuhan ekspor Kabupaten Paser. Selain itu, meningkatnya kinerja ekspor juga disebabkan oleh terdiversifikasinya komoditas ekspor dan lebih besarnya peran negara-negara *emerging markets* sebagai pasar tujuan ekspor Kabupaten Paser. Permintaan eksternal dan domestik (Indonesia) yang kuat berpengaruh positif bagi optimisme pelaku usaha terhadap prospek perekonomian, sehingga pada akhirnya mendorong kinerja investasi tumbuh meningkat. Sementara itu, tingginya permintaan domestik dan eksternal pada gilirannya berdampak pada tingginya pertumbuhan impor hingga melebihi pertumbuhan ekspor.

Kinerja ekspor yang meningkat cukup tinggi sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi global. Pada tahun 2012 kinerja ekspor mencapai 5,53 persen, sejalan dengan peningkatan produktivitas komoditas batubara⁷⁴. Meningkatnya kinerja ekspor dan semakin kondusifnya berbagai variabel makro ekonomi, berkontribusi pada kinerja investasi yang tumbuh cukup tinggi 6,98 persen). Iklim investasi yang membaik didukung oleh pembiayaan dari dalam dan luar negeri yang meningkat sehingga mendorong realisasi investasi tumbuh lebih cepat untuk

⁷⁴Data BAPPEDA Paser Bidang Sosial Ekonomi, 2015

merespons kenaikan kapasitas utilisasi seiring kuatnya permintaan. Perkembangan investasi yang cenderung meningkat sejalan dengan semakin membaiknya persepsi pelaku usaha dan investor terhadap iklim investasi di Kabupaten Paser.

4.2.1 Kondisi Pendidikan

Tingkat pendidikan setelah masuknya perusahaan ke Desa Laburan, adanya sekolah sekolah yang dibantu oleh perusahaan perkebunan memberikan tabahan pendidikan untuk generasi anak desa untuk menempuh pendidikan SD-SMP. Sehingga berdampak baik untuk kelangsungan pendidikan di Desa Laburan. Akan tetapi, berbeda terbalik di Desa Sunge Batu dan Desa Perepat hanya memiliki sekolah dasar di desa sunge batu. Masyarakat sekitar Desa Sunge Batu dan Desa Perepat. Mengininkan bantuan kepada pemerintah dan perusahaan untuk membantu guru dalam mengajar di kedua desa sunge batu dan desa perepat.

4.2.2 Kondisi Pola Hidup

Kehidupan masyarakat desa laburan, desa sunge batu dan desa perepat, memiliki kearifan lokal, dulunya masyarakat bercocok tanam seperti ladang berpindah, mengelola hasil hutan seperti rotan dan pohon garu, masyarakat setelah melakukan ladang berpindah menanam kembali hutan yang mereka tanam untuk padi menggantinya dengan pohon buah seperti mangga, ampalam, durian, buah cempedak, dan elai. Keterkaitan kearifan lokal dengan perekonomian, masyarakat yang memiliki hutan yang penuh dengan potensi, seperti rotan, yang menjadi produksi rotan no 1. Didunia adalah Indonesia, di provinsi Kalimantan timur, kabupaten pasir, masyarakat ketergantungan dengan hasil hutan seperti rotan.

Kerifan ekonomi, masyarakat desa laburan, sunge batu, dan perepat menjual hasil rotan secara perlahan sedikit demi sedikit, dengan cara mengumpulkan.

Dijual setiap minggu masyarakat berkerja cukup keras untuk mendapatkan rotan. Setelah masuknya perusahaan dalam alih fungsi hutan menjadi perkebunan merubah pola hidup masyarakat lokal desa laburan, sunge batu dan desa perepat. Berubahnya pola hidup masyarakat seperti dulunya tidak ada jalan sekarang setelah masuknya perusahaan masyarakat mendapatkan dan merasakan sarana jalan. Dulunya masyarakat naik sepeda sekarang masyarakat sudah bisa naik motor. Tidak ada listrik diDesa Laburan sekarang sudah ada pasokan listrik untuk menerangi desa. Akan tetapi di Desa Sunge Batu dan Desa Perepat belum mendapatkan pasokan listrik dari pemerintah. Dengan alih fungsi hutan menjadi perkebunan masyarakat mendapat perkebunan kelapa sawit, dikarenakan hilangnya hutan rotan dan tanaman buah buahan, perusahaan menggantinya dengan ganti rugi seperti mengganti luasan tanah milik Masyarakat Adat, tanam tumbuh pohon diganti karenan rusak akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit. Perusahaan akan membuka ribuan hektar Masyarakat akan mendapatkan perkebunan.

Dua haktare Dengan janji dari perusahaan fasilitas sarana dan prasarana di buat dan diperbaiki, seperti jalan, memberikan pasokan listrik, membuka lapangan pekerjaan, memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat terdampak akibat alih fungsi hutan. Akan mengakibatkan hilangnya sumber perekonomian mereka karena Cuma mendapat hasil 2 ha. diberikan oleh perusahaan berupa kebun sawit plasma tidak mampu memberikan sumber ekonomi untuk generasi selanjutnya.

Dalam hasil wawancara keterangan masyarakat bernama Bapak Mardi menyatakan :

“Perusahaan harusnya tidak merusak sumber ekonomi masyarakat, seharusnya perusahaan melestarikan kearifan lokal dan melestarikan sumber ekonomi dari hasil hutan. Inilah realita di lapangan dulunya ada musim buah - buahan hutan, seperti buah lahung durian merah, cempedak, elai, dan angrek angrek, fauna asli Kalimantan seperti monyet bekantan, beruang madu, burung enggang, dan ular, buaya, macan dahan, telah hilang akibat pembukaan hutan beralih fungsi menjadi perkebunan, telah merusak flora dan fauna alam sekitar sebaiknya ada peran pemerintah meminta pada perusahaan untuk menyisakan hutan untuk tinggal hewan hewan yang tersisa”.

Dari keterangan diatas saying bertentangan dengan kejeniusan manusia mencari keefisiensi untuk mendapatkan sumber ekonomi yang mudah tanpa memikirkan dampak lingkungan terhdap bumi, ekologi politik yang

4.2.3 Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan terjadi didesa penelitian terdapat beberapa masalah akibat dari berubahnya hutan menjadi perkebunan dan pertambangan. Menurut pembahasan tentang teori ekologi politik bahwa pengelolaan sumberdaya alam tidak bisa dipahami dari sudut pandang memprioritaskan efisiensi dan teknis. Seperti pendapat Adam dalam ekologi politik “kehijauan dan perencanaan pembangunan akan ditentukan bukan dari kepeduliannya dengan ekologi atau lingkungan di dalam dirinya, tetapi dalam keprihatinannya dengan masalah kekendalian, kekuasaan, dan kedaulatan⁷⁵”. Susahnya air bersih saat musim kemarau tidak ada bantuan dari perusahaan. Terjadi kekeringan akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan pertambangan. Karena hilangnya hutan untuk penyerapan oksigen dan air. Debu pada musim kemarau menjadi permasalahan

⁷⁵ Lihat Murat Arsel Jurnal *ekologi politik*, jurnal tanah air, (Internet). (Dikutip 18 april 2016) hal. 1

masyarakat. Akibat lalu lintas alat berat dan truk perusahaan. Masyarakat banyak mengalami gangguan pernapasan dan penglihatan. Hilangnya hewan dan tumbuhan asli Kalimantan. Berupa beruang, burung enggang, buaya, ular, rusa, kijang, dan lebah hutan penghasil madu.

Akibat sektor swasta dan pemerintah tersebut memberikan perijinan untuk alih fungsi hutan, biasanya berbentuk aktivitas pembukaan hutan dengan cara membakar. Pada umumnya, lahan atau hutan sengaja dibakar dengan alasan dan hilangnya keanekaragaman fauna dan flora berikut :

- a. Kegiatan perladangan oleh masyarakat sekitar hutan di Pulau Kalimantan
- b. Pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI)
- c. Pembukaan lahan untuk kelapa sawit
- d. Konflik atau pertikaian hak tanah antara pemilik Hak Pengusaha Hutan (HPH) dengan penduduk asli sekitar hutan di Kalimantan.
- e. Rusaknya kadar oksigen di lapisan atmosfer bumi.
- f. Berakibatnya Global Warming
- g. Hilangnya spesies endemik Kalimantan seperti beruang madu, macan dahan, burung enggang, buaya, ular, kukang, ayam hutan, kijang, biawak, bekantan, macan, burung punai, burung peregam, burung bubut, orang hutan dan rusa.
- h. Hilangnya tumbuhan endemik Kalimantan seperti kayu ulin, kayu ipil, meranti, bengkirai, kapur, rengas, angrek dan tumbuhan lainnya.

Akibat hilangnya keanekaragaman kehidupan di hutan menyebabkan ketidak seimbangan ekologi. Yang berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia untuk generasi selanjutnya. Pengembangan perkebunan kelapa sawit pada lahan-lahan yang memiliki tingkat kesesuaian sangat sesuai, Sesuai, agak sesuai. Namun dalam kenyataannya pengembangan areal perkebunan kelapa sawit juga dilakukan pada areal kurang sesuai termasuk lahan gambut. Proses alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit karena sebelum pengusaha melakukan investasi perkebunan kelapa sawit mereka telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dibawah ini adalah gambar pihak swasta proses alih fungsi hutan :

Gambar 4.6 Alih Fungsi Hutan



sumber : Gambar saat berlangsungnya alih fungsi hutan tgl 20 feb 2016 tanah pasir

Gambar diatas adalah dokumentasi peneliti, melihat pembukaan hutan yang akan dijadikan perkebunan, sedangkan kayu bekas *land clearing* tidak boleh masyarakat ambil dan manfaatkan, perusahaan hanya menggali lubang dan menimbun kayu – kayu hasil *land clearing* lahan. Bahkan banyak kasus yang terjadi didesa laburan perusahaan-perusahaan hanya menggunakan perkebunan kelapa sawit sebagai tameng untuk mengambil kayu hutan. Setelah kayu hutan diambil, lahan ditelantarkan dan tidak dijadikan perkebunan kelapa sawit. Penebangan hutan merupakan sumber terbesar kedua dalam meningkatkan level CO₂ karbon diokasida, di atmosfer hutan dapat dijual karena 1 hektar hutan dapat menyerap 250 – 300 ton CO₂, jadi jika dijual 1 ton CO₂ bernilai US \$ 5 ini sudah dapat mensejahterakan Masyarakat Adat Pedalaman Kabupaten Paser. Harus ada keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat untuk menghargai hutan, sehingga masyarakat tidak akan merubah hutan mereka menjadi perkebunan dan pertambangan. Apabila pemerintah memberikan jaminan ekonomi berupa \$ 5 per hektar agar tetap terjaga hutan Kalimantan sebagai paru paru dunia⁷⁶.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang merambah hutan bahkan telah memasuki lahan-lahan basah, seperti gambut membuat emisi CO₂ semakin meningkat. Secara ekologis sistem monokultur pada perkebunan kelapa sawit telah merubah ekosistem hutan, hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan hujan tropis, serta plsama nutfah. Selain itu juga mengakibatkan hilangnya sejumlah sumber air, sehingga memicu kekeringan, peningkatan suhu, dan gas rumah kaca yang mendorong terjadinya bencana alam. Perkebunan kelapa sawit

⁷⁶ Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta : Penerbit Erlangga. Hal 5

mengakibatkan berkurangnya kawasan resapan air, sehingga pada musim hujan akan mengakibatkan banjir karena lahan tidak mempunyai kemampuan menyerap dan menahan air.

Perubahan ekosistem hutan juga berdampak pada kehancuran habitat flora dan fauna. Perubahan ini mengakibatkan konflik antar satwa, maupun konflik satwa dengan manusia. Akibat habitat yang telah rusak, hewan tidak lagi memiliki tempat yang cukup untuk hidup dan berkembang biak.

4.3 Dampak Alih fungsi Hutan Menjadi Perkebunan dan Pertambangan

Dari adanya alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan pertambangan banyak dampak yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Paser. Dampak tersebut dirasakan baik dari sektor ekonomi, sektor pendidikan dan dampak terhadap perubahan lingkungan Kabupaten Paser sendiri. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit karena sebelum pengusaha melakukan investasi perkebunan kelapa sawit mereka telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Bahkan banyak kasus yang terjadi didesa laburan perusahaan-perusahaan hanya menggunakan hutan. Setelah kayu hutan diambil, lahan ditelantarkan dan tidak dijadikan perkebunan kelapa sawit. Dalam hasil wawancara inggong selaku Ketua Adat menyatakan:

“Selaku ketua adat di tiga desa tersebut mencakup desa laburan desa sunge batu dan desa perepat. Peran kepala adat dalam alih fungsi hutan adalah kepala adatlah yang berperan mengambil keputusan wilayah mana saja yang harus diganti tanam tumbuhnya akibat alih fungsi hutan yang dulunya perkebunan milik masyarakat pedalaman desa laburan sunge batu dan desa perepat. Hilangnya kearifan local masyarakat akibat dari terbukanya hutan, titak ada gotong royong antar masyarakat desa untuk menjaga hutan kembali agar tetap utuh. Kepala adatlah yang membatu pemerintah dalam menetapkan batas batas di lokasi pembukaan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit”.

Dari keterangan inggong diatas, dapat disimpulkan bahwa alih fungsi hutan yang terjadi mengakibatkan hilangnya ekosistem yang ada, hilangnya hewan-hewan endemik di hutan Kalimantan⁷⁷. Dampak positif dari adanya perkebunan kelapa sawit juga pertambangan adalah mengurangi pengangguran di desa, terciptanya sarana dan prasarana antar desa.

4.3.1 Dampak Ekonomi

Dampak dari alih fungsi hutan terhadap ekonomi masyarakat kabupaten paser berpengaruh dengan nilai tukar di pasar. Apabila disaat musim panen sawit baik dengan harga buah tinggi maka pasar di kabupaten banyak perputaran ekonomi. Ini menandakan bahwa perkebunan dan pertambangan sangat berpengaruh dalam kemajuan perekonomian. Perekonomian yang terjadi dikabupaten paser tersebut sangat berhubungan dengan teori ekonomi politik Martin Staniland dalam teorinya menyatakan “ekonomi politik itu merupakan hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan yang saling menguntungkan antara sumber sumber produksi, distribusi, dan konsumsi termasuk didalamnya sumber sumber yang terkait alih fungsi hutan terhadap kesejahteraan masyarakat”.

Masyarakat yang memiliki perkebunan sawit pendapatan dari hasil pembagian kebun plasma 2 ha per kepala keluarga sebanyak 4-5 juta perbulan. Disinilah masyarakat terdampak akibat alih fungsi hutan tersebut mendapatkan kepastian jaminan kehidupan dan jaminan perekonomian. Dari keterangan masyarakat, setelah peneliti melakukan observasi banyak perubahan kemajuan

⁷⁷Wawancara Inggong, Ketua Adat Desa Laburan, Sunge batu menyatakan bahwa dampak dari alih fungsi hutan menyebabkan hilangnya flora dan fauna endemik Kalimantan, di Kabupaten Paser, pada tanggal 02 Januari 2016

desa menjadi lebih baik seperti. Mendapatkan jaminan penghasilan berupa perkebunan plasma masing masing desa menjadapat 20% kebun sawit dari luasan desa mereka. Banyaknya pemanfaatan tenaga kerja diambil dari daerah. Lapangan kerja. Terbukanya jalan jalan desa dulu tidak memiliki jalan sekarang sudah terdapat jalan desa. Dulu tidak ada jalan berbatu sekarang akibat adanya perusahaan jalan yang rusak menjadi lumayan baik karena perusahaan membantu memperbaiki jalan desa.

Mendapatkan ganti tanam tumbuh. Seperti tumbuhan asli dari desa yang ditanam masyarakat pedalaman mendapatkan ganti rugi berupa kompensasi uang. Pendapat dari kebun sawit lebih baik dari pada perkebunan masyarakat dulu bergantung pada hasil hutan berupa rotan, buah buahan, hewan buruan yang dihasilkan dari hutan. Pendaptan devisa daerah meningkat dengan adanya perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara yang terdapat di Kabupaten Paser.

4.3.2 Pola Hidup

Dari pola hidup sampai adanya pendidikan layak untuk generasi selanjutnya, dan jaminan kesehatan telah didapatkan masyarakat desa. Terjadi perbaikan pola ekonomi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan sehari hari. Setelah adanya alih fungsi hutan tersebut, terutama masyarakat mendapat pekerjaan akibat pembukaan hutan. Masyarakat mendapatkan jaminan ekonomi berupa kebun sawit diberikan oleh pihak perusahaan sebanyak 20 % dari luasan desa.

Seperti desa laburan memiliki luasan wilayah seluas 6000 ha desa berhak memiliki sebanyak 20% dari 6000 ha⁷⁸. Yaitu sebanyak 1200 ha haru diberikan, dibuatkan oleh pihak perusahaan. Berbentuk kebun sawit 1200 ha. Dan itu sepenuhnya diberikan untuk desa dan masyarakat sekitar. 1200 ha tersebut. Akan dibagi masing – masing kk mendapat 2 ha kebun sawit. Masing masing kepala keluarga memperoleh 2 ha kebun sawit diberikan oleh perusahaan disebut kebun plasma milik masyarakat. Akan tetapi hasil dari kebun tersebut berupa buah sawit harus disetor ke pabrik milik perusahaan yang memberikan kebun plasma.

Pembangunan kehutanan pada hakekatnya mencakup semua upaya pemanfaatan dan pemantapan sumber daya alam hutan beserta ekosistemnya, baik berfungsi sebagai pelindung dan penyangga kehidupan maupun sebagai pelestarian keanekaragaman sumber daya hayati yang nanti mampu menjadi sumber ekonomi bagi pembangunan. Namun dalam realitanya tiga fungsi utamanya sudah hilang, yaitu fungsi ekonomi jangka panjang, fungsi lindung dan estetika sebagai dampak kebijakan pemerintah. Hilangnya ketiga fungsi di atas mengakibatkan semakin luasnya lahan kritis yang diakibatkan oleh pengusahaan hutan yang tidak mengindahkan aspek kelestarian.

Hilangnya kearifan lokal akibat dari beralihnya budaya dari masyarakat yang tidak kenal kapitalisme dan individual. Masuknya perkebunan kelapa sawit ke daerah pedalaman membuat ke arifan lokal di desa penelitian berlangsung sudah tidak ditemukan lagi kearifan lokal. Contoh kearifan lokal yang seharusnya tetap terjaga sampai saat ini seperti kearifan lokal. Kepercayaan dan pemujaan

⁷⁸ Hasil Penelitian tanggal 18 febuari 2016

terhadap roh leluhur, Pengakuan terhadap kekuatan alam gaib, tercampur dengan penghargaan terhadap alam dan digambarkan secara animisme dan dinamisme, Serta pengakuan atas eksistensi Ranying Hatalla (Tuhan Yang Maha Kuasa Semesta Alam). Persembahan tarian untuk roh leluhur seperti tarian adat tari belian. Dikramatkanya suatu wilayah atau gunung gunung besar oleh masyarakat sekitar. Kebanyakan tempat yang dikeramatkan masyarakat adalah tempat yang sangat berpotensi sumber daya alamnya.

4.3.3 Dampak Lingkungan

Dampak dari alih fungsi hutan hal ini berakibat pada hilangnya kemampuan daya serap hutan terhadap karbon mencapai 10 juta ton per tahun. Penebangan hutan merupakan sumber terbesar kedua dalam meningkatkan level CO₂ karbon diokasida, di atmoster, hutan dapat dijual karena 1 hektar hutan dapat menyerap 250 – 300 ton CO₂, jadi jika dijual 1 ton CO₂ bernilai US \$ 5 sudah dapat mensejahterakan masyarakat adat pedalaman kabupaten paser⁷⁹.

Apabila program ini disosialisakan pada seluruh masyarakat Kalimantan dan pulau – pulau besar lainnya maka Indonesia akan kaya dengan penghasilan oksigen terbesar didunia dan kita akan di hargai dunia. Apabila desa memiliki kawasan hutan 6000 ha, berarti desa itu sudah memiliki pendapatan ekonomi \$ 9.000.000/ tahun, bila dirupiahkan dengan mata uang Indonesia bernilai : Rp 11.700.000.000. pertahun. Negara Indonesia menjadi Negara super power didunia

⁷⁹ David Glover, Kerugian Lingkungan Akibat Kebakaran dan Asap di Indonesia, (Jurnal) hal. 6-9.

karena penghasil oksigen, nilai sangat ekonomis⁸⁰. Adanya perubahan peruntukan lahan ini sangat bertentangan dengan prinsip penyelamatan lingkungan hidup dan hutan di tengah meningkatnya bencana ekologis seperti banjir besar tiga kali setahun, kebakaran lahan mengakibatkan asap dan meningkatnya rawan bencana di kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Contoh untuk memenuhi pembangunan lingkungan yang bersifat ekologis seperti, kelompok masyarakat yang menganut mekanisme pasar akan cenderung memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar. Akibatnya eksploitasi bahan tambang, penebangan hutan, dan dampak pembuangan limbah. Haruslah ada campur tangan pemerintah untuk mengontrol perkembangan pembangunan lingkungan, maka pemanfaatan hutan dan penebangan kayu boleh di ijin sepanjang perusahaan yang bersangkutan melakukan peremajaan hutan (reboisasi).

Dari sektor pertambangan penambangan bisa dilaksanakan apabila memenuhi suatu studi atau pengkajian apakah suatu usulan proyek/gagasan usaha apabila dilaksanakan dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuannya atau tidak *feasibility study* untuk penerbitan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk tidak ada dampak kerusakan lingkungan disekitarnya. Apabila bagi suatu perusahaan benar mencemari lingkungan dapat dikenakan sanksi atau peraturan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

⁸⁰Hasil Penelitian mendapatka informasi dari informan tentang harus ada harga oksigen yang dihasilkan oleh hutan agar masyarakat menjaga hutan dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat kebijakan ini bisa dibuat dari pemimpin daerah dan negara tanggal 18 febuari 2016

Masyarakat desa mendapat bantuan berupa perbaikan sekolah dan anak-anak menuju sekolah menggunakan bus sekolah diberikan perusahaan kepada desa. Diatas adalah perubahan baik untuk perkembangan desa ini ada beberapa contoh perubahan kurang baik akibat dari alih fungsi hutan yaitu berupa. Susahnya air bersih saat musim kemarau tidak ada bantuan dari perusahaan. Terjadi kekeringan akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan pertambangan. karena hilangnya hutan untuk penyerapan oksigen dan air. Debu pada musim kemarau menjadi permasalahan masyarakat. Akibat lalulang alat berat dan truk perusahaan.

Masyarakat banyak mengalami gangguan pernapasan dan penglihatan. Mendangkalnya aliran sungai karena tiga ratus meter dari bibir sungai telah beralih fungsi menjadi pertambangan dan perkebunan sehingga penghambat air hujan turun tidak ada lagi. Perusahaan belum membagi rata kebun plasma milik desa. Hilangnya heawan dan tumbuhan asli endemik Kalimantan. Berupa beruang, burung enggang, buaya, ular, rusa, kijang, dan lebah hutan penghasil madu, ayam hutan. Obat obatan alamiyah, pasak bumi, lengkuas, angrek asli kalimantan. Semua flora dan fauna hilang akibatnya hutan yang beralih fungsi menjadi perkebunan dan pertambangan.

Masyarakat tidak dapat melakukan pembukaan lahan yang luas karena kawasan hutan di kabupaten paser sudah dikuasai oleh perusahaan. Hilangnya Jenis jenis pohon endemik Kalimantan kayu boli, meranti, bengkirai, ulin. Kurangnya kontrol dari lingkungan hidup pemerintah dalam memperbaiki reklamasi tambang yang dilakukan oleh perusahaan swasta bergerak di bidang

pertambangan batu bara⁸¹. Akibat aktifitas pertambangan hilangnya tanah lapisan atas menyebabkan kegersangan, kekeringan dan lapisan tanah bawah naik kepermukaan yang terdapat kandungan merkuri, sulfur dan zat asam tanah mengalir ke aliran sungai penduduk.

Penjelasan diatas adalah kekurangan dan kelebihan akibat dari pembukaan hutan menjadi perkebunan dan pertambangan yang terdapat di Desa Labura, Sunge Batu dan Desa Mura Komam. Terletak di dua kecamatan di kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Paser Belengkong, di Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

4.4 Peran Pemerintah dan Sektor Swasta

Peran pemerintah dan sektor swasta dalam alih fungsi hutan di Kabupaten Paser yang terjadi di dua Kecamatan Paser Belengkong dan Kecamatan Muara komam yaitu berperan sebagai berikut :

4.4.1 Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam alih fungsi hutan membuat peraturan dan kebijakan politik telah memberikan ijin untuk mengelola dan eksploitasi hutan, agar adanya pembangunan di desa - desa terpencil di kabupaten paser, terciptanya sarana dan prasarana membuat perputaran ekonomi bagi Daerah. Pemerintah mempertegas hukuman dan memperjelas peraturan bagi pelanggar aturan dalam alih fungsi hutan. Pemerintah adalah sekumpulan orang yang ditugasi untuk menjalankan kehidupan suatu negara, yang bertanggung jawab untuk membuat

⁸¹Dokumentasi Penelitian di Kecamatan, Muara Komam, Paser Belengkong tanggal, 02 maret 2016

kebijakan. Pemerintah dalam alih fungsi hutan membuat beberapa kebijakan. Pengertian dari kebijakan adalah salah satu unsur vital dalam organisasi atau lembaga apapun, apakah itu lembaga pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, LSM, donor, atau lembaga internasional, bahkan dalam keluarga atau institusi informal sekalipun.

Kebijakan merupakan landasan untuk tindakan-tindakan nyata di lapangan. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan tentang alih fungsi hutan yaitu kebijakan pengelolaan hutan bisa meliputi berbagai aspek dari perencanaan sampai perdagangan. Misalnya bagi pengusaha HPH (Hak Pengusahaan Hutan) atau dalam peraturan baru disebut IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan kayu) ada instrumen fiskal dan finansial berupa pungutan Provisi Sumber Daya Hutan PSDH, Dana Reboisasi (DR) atau yang akhir-akhir ini cukup ramai dibicarakan yaitu retribusi yang dipungut oleh pemerintah kabupaten⁸².

Dan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit pemerintah memberikan perijinan seperti Ijin lokasi, Ijin usaha perkebunan, pelepasan kawasan hutan, dan penerbitan Hak Guna Usaha HGU. Untuk penerbitan perijinan pertambangan pemerintah memiliki persyaratan sebagai berikut rekomendasi dari Desa, Kecamatan dan Bupati. Adfis teknis dari pertambangan, pelepasan kawasan hutan bila berada dikawasan KBK, atau Hutan Lindung harus mengurus ijin pinjam pakai kawasan dikementrian, setelah itu keluarlah Ijin Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP), setelah terbitnya ijin wiup harus diterbitkan kembali Ijin

⁸²Wawancara, Penelitian, di Kecamatan, Muara Komam, tanggal, 08 Kabupaten Paser tahun 2016

Explorasi, dan Amdal, untuk menerbitkan Ijin Usaha Produksi untuk pertambangan batubara.

4.4.2 Peran Sektor Swasta

Peran sektor swasta dalam alih fungsi hutan yang terjadi di Kabupaten Paser perusahaan berperan untuk membangun sarana dan prasarana desa dengan masuknya perusahaan ke desa – desa pedalaman. dan membantu pemerintah untuk menambah pendapatan daerah, dengan cara mengelola kawasan hutan produksi, hutan tidak produksi yang ditanam sawit agar ada pemasukan untuk daerah, dan pertambangan juga berperan penting untuk pembangunan daerah. Salah satu penghasilan besar daerah berasal dari pertambangan galian.

4.5 Data Badan Pusat Statistik Mengenai Tingkat Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Paser

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Paser adalah gambaran untuk mengetahui bagaimana perkembangan kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun, dan perkembangan tingkat kemiskinan yang ada di kabupaten Paser, dapat mengetahui indikator perekonomian dari tahun ketahun dan bersumber dari apa saja peningkatan perekonomian, juga mengetahui perkembangan pertumbuhan manusia yang ada di kabupaten Paser⁸³. Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008

⁸³Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Paser. Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik yang akan dijelaskan tugas, fungsi dan kewenangannya BPS Kabupaten Paser :

- a. Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistic
- c. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional
- d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- e. Penetapan sistem statistik nasional
- f. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.
- g. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya
- h. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro
- i. Penetapan sistem informasi di bidangnya
- j. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasiona
- k. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistic.
- l. Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

Badan Pusat Statistik Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik⁸⁴. Ada beberapa materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :

- a. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
- b. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
- c. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
- d. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

⁸⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser tahun 2016

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder
- b. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
- c. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
- d. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

4.5.1 Tingkat Kesejahteraan Kabupaten Paser

Tingkat kesejahteraan Kabupaten Paser berdasarkan Badan Pusat Statistik Data yang digunakan dalam publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser Tahun 2012 ini, adalah hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009 (angka revisi), 2010 dan 2011 Kabupaten Paser, kemudian data Sensus Penduduk 2010 dan data Produk Domestik Regional Bruto 2011 Kabupaten Paser. Khusus untuk data ketenagakerjaan menggunakan hasil dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2011 Kabupaten Paser. Serta ditunjang data sekunder dari Dinas Kesehatan Kabupaten Paser⁸⁵. Penyajian Indikator

⁸⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser tahun 2016

Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser Tahun 2012 diuraikan dalam Sembilan bagian untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat kab paser yaitu :

a. Kependudukan

Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan kependudukan atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan. Masalah kependudukan memiliki posisi yang sangat penting bagi pembangunan daerah, sehingga data kependudukan sangat diperlukan sebagai penentu kebijakan maupun perencanaan program. Lebih luas lagi data kependudukan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang lalu dan yang sedang berjalan, bahkan dapat memperkirakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Pembangunan manusia dititikberatkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Penitikberatan pada kualitas SDM diperlukan karena penduduk yang besar hanya akan dapat merupakan aset pembangunan jika “kualitasnya” (dilihat dari derajat kesehatan dan atau tingkat pendidikan) cukup baik. Jumlah penduduk yang besar disadari hanya merupakan beban pembangunan jika

berkualitas rendah apabila dilihat dari komposisinya secara sosial dan budaya yang sangat beragam.

b. Kesehatan dan Gizi

Kesehatan dan gizi merupakan bagian dari indikator kesejahteraan penduduk dalam hal kualitas fisik, dalam hal ini dapat dilihat melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat melalui pemberian imunisasi, penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas fisik penduduk telah dilakukan yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan bagi seluruh penduduk baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Penyediaan sarana kesehatan yang memadai merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam upaya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, dan program ini terus ditingkatkan kualitas pelayanan serta keberadaannya. Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Paser ternyata cukup memadai untuk jumlah penduduk yang harus dilayani. Hal ini dapat dilihat dari jumlah puskesmas, rumah sakit, dan jumlah tenaga medis yang ada di Kabupaten Paser.

Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 terdapat satu unit rumah sakit, 17 unit puskesmas, 94 unit pusban, 17 unit puskesmas keliling, dan didukung 642 orang tenaga kesehatan. Bila dikaitkan dengan jumlah penduduk, maka sebuah puskesmas/puskesmas

pembantu di wilayah Kabupaten Paser melayani kurang lebih 2.000 penduduk. Idealnya, satu puskesmas hanya melayani kurang lebih 7.000 penduduk. Jadi, di Kabupaten Paser jumlah puskesmas kurang memadai dengan jumlah penduduk. Kedepan, untuk lebih mendekatkan akses masyarakat ke sarana layanan kesehatan, akan lebih baik jika keberadaan puskesmas/puskesmas pembantu mampu menjangkau masyarakat di desa secara langsung sehingga mengurangi biaya transportasi untuk berobat.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui pelaksanaan berbagai program pendidikan dan keterampilan. Mereka yang mempunyai pendapatan tinggi memiliki kemungkinan/peluang lebih besar untuk memperoleh pendidikan yang tinggi. Sebaliknya, mereka yang mempunyai pendapatan rendah, kecil kemungkinannya untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Dengan demikian dari sudut sosial ekonomi, tingkat pendidikan seseorang merefleksikan tingkat kesejahteraannya. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Pada dasarnya pendidikan yang diupayakan bukan

hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga masyarakat dan keluarga. Banyaknya penduduk yang mendapatkan pendidikan di sekolah merupakan indikator tersedianya tenaga terdidik atau sumber daya manusia terdidik yang tersedia saat ini.

Besaran ini ditunjukkan oleh angka partisipasi sekolah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang berasal dari hasil Susenas, diantaranya menyajikan persentase partisipasi bersekolah yang dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu: penduduk yang tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah, dan tidak bersekolah lagi. Pada tahun 2011 penduduk di Kabupaten Paser yang tidak/belum pernah sekolah mengalami penurunan bila dibanding dengan tahun 2010 dari 6,69 persen menjadi sekitar 4,15 persen dengan rincian 3,07 persen untuk laki-laki dan 5,36 persen untuk perempuan.

Dari angka ini kita dapat melihat bahwa untuk perempuan persentasenya lebih besar daripada laki-laki, hal ini menunjukkan bahwa kesempatan anak perempuan untuk mengenyam pendidikan lebih kecil daripada anak laki-laki. Hal ini tentu terjadi karena sudah merupakan “kebiasaan” untuk mengutamakan pendidikan anak laki-laki daripada anak perempuan. Selanjutnya persentase penduduk yang masih sekolah di Kabupaten Paser untuk usia 10 tahun keatas sebesar 19,31 persen, yaitu 19,57 persen untuk laki-laki dan 19,03 persen untuk perempuan. Kemudian persentase penduduk yang tidak bersekolah lagi sebesar 76,53 persen, dengan rincian 77,37 persen untuk laki-laki dan 75,60 persen untuk perempuan.

d. Ketenagakerjaan

Data ketenagakerjaan dewasa ini semakin diperlukan, terutama untuk evaluasi dan perencanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta produktifitas tenaga kerja. Sangat masuk akal jika analisis mengenai kualitas sumber daya manusia biasanya menempatkan faktor ketenagakerjaan sebagai salah satu dimensi yang vital. Apabila kita bicara masalah penduduk usia kerja dewasa ini menurut UU No. 20 tahun 1999, berarti kita berbicara tentang penduduk usia 15 tahun keatas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan orang tidak bekerja yang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja, adalah penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang tidak bekerja, tidak mencari pekerjaan, tetapi kegiatan golongan ini masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (seperti tidak mampu bekerja, pensiun).

Hasil Sakernas 2011 Kabupaten Paser seperti terlihat pada table menunjukkan bahwa penduduk usia kerja (15 tahun keatas) tercatat 165.770 orang, yang terdiri dari angkatan kerja sekitar 113.789 orang (68,64 persen) dan bukan angkatan kerja sekitar 51.981 orang (31,36 persen). Sebagian besar penduduk usia kerja tersebut kegiatan utamanya adalah bekerja (62,87 persen).

Bila dilihat dari jenis kelamin penduduk usia kerja, angkatan kerja laki-laki (90,10 persen) lebih besar dibandingkan dengan angkatan kerja perempuan (43,76 persen).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah penduduk usia kerja laki-laki lebih berpotensi untuk bekerja dibanding dengan penduduk perempuannya. Sebaliknya untuk penduduk usia kerja perempuan yang termasuk bukan angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Kegiatan utama seminggu yang lalu untuk penduduk usia kerja laki-laki sebagian besar adalah bekerja (83,45 persen) sementara penduduk usia kerja perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga (45,24 persen)⁸⁶.

Tabel 4.1 Perkembangan Tenaga kerja Kabupate Paser

Kegiatan Utama	Laki-Laki	%	Perempuan	%	Total	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Angkatan Kerja	80 197	90,10	33 592	43,76	113 789	68,64
Bekerja	74 281	83,45	29 942	39,01	104 223	62,87
Mencari Pekerjaan	5 916	6,65	3 650	4,76	9 566	5,77
2. Bukan Angkatan Kerja	8 816	9,90	43 165	56,24	51 981	31,36
Sekolah	5 094	5,72	6 994	9,11	12 088	7,29
Mengurus Rumah Tangga	549	0,62	34 727	45,24	35 276	21,28
Lainnya	3 173	3,56	1 444	1,88	4 617	2,79
Jumlah	89 013	100,00	76 757	100,00	165 770	100,00

Sumber : Indikator Kesejahteraan Kabupaten Paser tahun 2012

4.5.1 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Paser

Tingkat kemiskinan dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dapat diketahui indikator kemiskinan yang bersifat makro seperti jumlah dan

⁸⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser tahun 2016

persentase penduduk miskin. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2008 – 2011 terlihat pada table yaitu :

Tabel 4.2 Kemiskinan Penduduk Tahun 2008 – 2011

Tahun	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3
2011	19 100	7,91
2010	22 100	9,49
2009	18 370	10,11
2008	19 700	10,97

Sumber : BPS Kabupaten Paser

Dapat dilihat dari perkembangan dari tahun 2008 sampai 2011 masih ada peningkatan kemiskinan penduduk di Kabupaten Paser rata – rata sekitar 2 % pertahunnya dengan demikian dapat peneliti simpulkan dampak dari alih fungsi hutan terhadap kesejahteraan masyarakat adat pedalaman, tidak berpengaruh dalam perkembangan perekonomian penduduk sekitar yang terdampak dari alih fungsi hutan.

4.5.2 Indikator Perekonomian Ekspor dan Impor Kabupaten Paser

Aktivitas ekspor – impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan Negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan

domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang. Ekspor – impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Sebagai salah satu daerah penghasil batu bara, Kabupaten Paser mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap eksport batu bara Kaltim. Pada tahun 2005 total eksport batu bara Kabupaten Paser sebesar 13.364.357 MT dengan nilai US \$ 367.891.684.77 dan tahun 2007 sebesar 14.587.415 MT dengan nilai US \$ 443.051.158.89. Dari 17 negara pengimport batu bara dari Kabupaten Paser, tiga negara pengimport terbesar adalah Korea, Taiwan dan India, dengan masing-masing total import sebesar 183.342.789.46 MT, 59.175.300.00 MT, dan 48.322.447.50 MT.

4.5.3 Indikator Perekonomian Kabupaten Paser

Perubahan aktivitas ekonomi akan sangat berkait erat pula dengan dinamika ketenagakerjaan. Indikator ketenagakerjaan dapat menggambarkan tentang bagaimana daya serap perekonomian terhadap pertumbuhan dan produktivitas tenaga kerja. Jika aktivitas ekonomi bergerak dinamis biasanya

akan diikuti oleh tingginya serapan tenaga kerja dan pada gilirannya mengurangi pengangguran. Indikator ketenagakerjaan yang diulas berikut ini menggunakan pendekatan Konsep Standar Angkatan Kerja (*standard labour force concept*), Indikator ini dapat digunakan sebagai penilaian keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di daerah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*Labour Supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang – barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK Kabupaten Paser dari tahun ke tahun berfluktuatif dengan nilai diatas 60,00 persen.

Tabel. 4.2 Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, dan TPT Kabupaten Paser, Tahun 2008 – 2012

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angkatan Kerja (jiwa)	90 751	88 447	99 383	113 789	124 425
TPAK (%)	67	64,06	61,97	68,64	72,01
TPT (%)	7,76	7,64	6,82	8,41	10,81

Sumber : BPS Kabupaten Paser (SAKERNAS 2012)

Isu penting lain terkait ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran. Angka pengangguran seringkali menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah, bahkan cukup banyak pula dijadikan indikator makro pencapaian kinerja pemerintah daerah setempat.

Isu penting lain terkait ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran. Angka pengangguran seringkali menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah, bahkan cukup banyak pula dijadikan indikator makro pencapaian kinerja pemerintah daerah setempat. Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu bersamaan mereka tidak bekerja (*jobless*).

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Paser Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak dari kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil khususnya dalam bidang ekonomi. Bagi daerah indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, dan berguna sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan dan arah pembangunan dimasa yang akan datang. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan secara berkala karena PDRB ADHK tidak dipengaruhi oleh faktor harga (inflasi / deflasi). Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan.

Secara umum, dampak krisis ekonomi global terhadap perekonomian Kabupaten Paser mulai terlihat. Pada tahun 2008, rata-rata pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Paser sebesar 7,10 persen. Pada tahun 2009,2010 pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan yaitu 7,74 persen dan 17,31 persen.

Pada tahun 2011 kondisi perekonomian Kabupaten Paser mulai melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai pertumbuhan ekonomi yang kembali turun menjadi 10,85 persen. Kemudian tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi sedikit melambat lagi menjadi 8,61 persen.

Struktur perekonomian menggambarkan berapa besar peran masing - masing sektor terhadap pembentukan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari nilai peran sembilan sektor perekonomian bisa dilihat sektor mana yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan angka PDRB. Dengan melihat besarnya peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB suatu negara atau daerah, dapat diketahui mana kecenderungan struktur ekonomi negara atau daerah tersebut. Seiring dengan berkembangnya perekonomian suatu daerah, maka akan terjadi pula perubahan-perubahan peranan setiap sektor yang berakibat bergesernya struktur ekonomi daerah tersebut.

Struktur ekonomi Kabupaten Paser hingga tahun 2012 masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalan. Jika diperhatikan lebih lanjut, Kontribusi sektor pertambangan dan penggalan terhadap pembentukan nilai PDRB dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 kontribusi sektor ini mencapai 78,42 persen dan pada tahun 2012 mencapai 78,28 persen. Perlu diketahui bahwa penjualan komoditas batubara dihargai dengan mata uang asing. Sehingga fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sangat mempengaruhi nilai tambah bruto sektor pertambangan dan penggalan.

Tabel 4.3 Struktur Ekonomi Kabupaten Paser, Tahun 2008 – 2012 (%)

Sektor	2008	2009	2010 ^{r)}	2011 ^{*)}	2012 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	15,21	15,27	12,66	11,52	11,45
a. Tanaman Bahan Makanan	1,66	1,49	1,29	1,12	1,19
b. Perkebunan	6,03	6,32	5,22	4,96	4,51
c. Peternakan	0,88	0,89	0,75	0,70	0,73
d. Kehutanan	2,31	2,08	1,60	1,29	1,27
e. Perikanan	4,33	4,49	3,80	3,45	3,75
2. Pertambangan dan Penggalian	72,51	72,01	76,37	78,42	78,28
3. Industri Pengolahan	1,08	1,06	0,86	0,81	0,28
4. Listrik, Gas, Air Bersih	0,16	0,16	0,13	0,12	0,12
5. Bangunan	2,49	2,39	2,04	1,79	1,84
6. Perdagangan, Hotel, Restoran	3,88	4,10	3,59	3,27	3,30
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,73	0,72	0,61	0,54	0,57
8. Keu, Persewaan, Perusahaan	1,04	1,04	0,91	0,84	0,86
9. Jasa – Jasa	2,91	3,25	2,84	2,69	2,74
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Paser

r) angka revisi

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Dari struktur perekonomian Kabupaten Paser salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pemasukan daerah adalah pemasukan dari sektor pertanian, sektor pertanian dalam lima tahun ini secara berurutan adalah 15,21 persen, 15,27 persen, 12,66 persen, 11,52 persen, dan 11,45 persen. Dari beberapa sub sektor pertanian, kontribusi terbesar diberikan oleh sub sektor perkebunan. Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap pembentukan nilai tambah sektor pertanian dari tahun 2008 sampai tahun 2012 secara berurutan adalah 6,03 persen, 6,32 persen, 5,22 persen, 4,96 persen dan 4,51 persen. Kontribusi sektor perkebunan memberikan gambaran dalam penelitian ini. Peran dari perkebunan dan pertambangan adalah sumber perputaran perekonomian di Daerah Kabupaten Paser.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari analisis terhadap hasil penelitian dilapangan tentang dampak alih fungsi hutan terhadap kesejahteraan masyarakat pedalaman, maka peneliti dapat menyimpulkan. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan pertambangan sangat berpengaruh untuk memajukan kesejahteraan masyarakat pedalaman dari dukungunan pemerintah yang memberikan perijinan untuk konversi hutan. Memberikan dampak kepada pendapatan Daerah. Secara ekonomi pendapatan daerah menjadi meningkat akibat konversi hutan, menjadi perkebunan dan pertambangan.

Salah satu dampak yang dirasakan baik oleh masyarakat terbangunnya sarana dan prasarana terbangun dikabupaten paser, seperti adanya jembatan - jembatan penghubung antara desa satu dengan yang lainnya, terjaminnya kesehatan masyarakat karena pembangnan rumah sakit maupun puskesmas di Desa, yang mengurangi angka kematian penduduk akibat penyakit.

Untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan tidak terlepas dari peran Pemerintah dan Sektor Swasta. Membukanya jalan-jalan baru penghubung antar desa desa yang dulunya masyarakat tidak pernah merasakan jalan yang dapat digunakan sepeda atau motor, sekarang setelah terjadinya konversi hutan menjadi pertambangan dan perkebunan, masyarakat merasakan dampak secara langsung mendapatkan pekerjaan baru, dan terbangunnya pembangkit listrik Desa,

terbangunya Sekolah Dasar di Desa Pedalaman. Dari kemajuan perekonomian yang dirasakan masyarakat dengan banyaknya kemajuan perekonomian dan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat, Tidak terlepas dari peran Pemerintah dan Sektor Swasta yang memajukan dan membuat perputaran perekonomian di Desa, Kecamatan, dan Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

Analisis peneliti terjadinya konversi hutan (*deforestation*) dapat mengakibatkan hilangnya, ekosistem flora dan fauna endemik Kalimantan Kabupaten Paser. Tidak hanya kehilangan flora dan fauna endemik kalimantan. Memudarnya kearifan lokal, hilangnya pohon – pohon besar sebagai pemasuk kebutuhan oksigen dunia. Adalah salah satu kerugian yang dialami oleh Negara dan masyarakat dari sisi lingkungan, sosial, budaya, dan politik.

Setelah Penelitian ini berlangsung banyak akibat dari aktifitas pertambangan dan hilangnya hutan. Menyebabkan kekeringan, kebakaran hutan dan tanah lapisan bawah naik kepermukaan akibat dari pertambangan galian yang menimbulkan adanya kandungan-kandungan merkuri, sulfur dan zat asam. Mengalir ke aliran sungai yang dikonsumsi penduduk. Juga mengakibatkan hilangnya hewan-hewan dan ikan yang berada didalam aliran sungai yang tercemar akibat konversi hutan secara berlebihan. Peranan penting dari pemerintah untuk mengontrol dampak lingkungan yang di sebabkan dari konversi hutan, harus berdampak baik untuk keberlangsungan kehidupan manusia, alam dan lingkungannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini peneliti menyarankan akibat dari alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan pertambangan mengakibatkan pengaruh terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat. Haruslah pembangunan produksi untuk kebutuhan manusia juga memikirkan dampak terhadap lingkungan. Lebih dibutuhkan kesadaran dan tindakan untuk mengatasi permasalahan akibat alih fungsi hutan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat pedalaman, maupun dari sisi ekonomi dan ekologi. Pembangunan harus perpolakan berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem yang ada, lebih ditegaskan dengan hukuman perusakan hutan dan pemusnahan flora dan fauna akibat pembukaan hutan agar generasi kita selanjutnya masih dapat merasakan sumberdaya alam yang ada sekarang, luar biasa banyaknya dan beraneka ragam harus kita lestarikan. Harus ada tindakan jelas untuk pencegahan perusakan hutan dan ekosistemnya. Semua ini hanya sia-sia apabila tidak ada peran dari peneliti, masyarakat, pemerintah dan perusahaan harus saling bersinergi untuk membangun perekonomian dengan landasan dampak lingkungan, inilah hasil rekomendasi dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Nababan, Abdon. *Pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat*. Antara Konsep dan Realitas Oleh Abdon Nababan1 Otonomi Daerah Pemberlanjutan engrusakan Hutan. Diakses pada 16 nov 2015 pkl 12.00 wib.
- Rofieq, Ainur. *PELAYANAN PUBLIK DAN WELFARE STATE*.jurnal. Universitas islam malang.
- R. Semiawan, Conny. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Asdak,ph.d, Chay. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis,Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*.
- Deliarnov 2006 *ekonomi politik*. Jakarta: Erlangga.
- Dokumentasi penelitian masyarakat memanen rotan di desa laburan yang akan beralih fungsi menjadi perkebunan sawit tgl 10 desember2015
- Data Bapeda pasir peta perkebunan, pertambangan, dan kawasan hutan 2015
- Glover, David. *Kerugian Lingkungan Akibat Kebakaran dan Asap di Indonesia*.
- Deliarnov 2006 *ekonomi politik*. Jakarta: Erlangga.
- Global Forest Resources Assessment: Progress towards Sustainable Forest Management, Food and Agriculture*
- Global Forest Resources Assessment, Food and Agriculture Organization of The United Nations, 2005*
- Gambar penelitian di desa Batu kajang dan Desa Muara Komam tgl 18 feb 2016*
- Gambar saat berlangsungnya alih fungsi hutan tgl 20 feb 2016 tanah pasir*

- Hubberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta.
- Suryadi, Harry dan Hira Jhamtani, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Rencana Tindak Penanggulangan Bencana*, Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 1998.
- D. Maswara. 2015. *Peran Kejaksaan Dalam Alih Fungsi Hutan Adat Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit*. Laporan praktik kerja nyata. Universitas brawijaya malang.
- Sirait, Martua 2001, *Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam era Otonomi Daerah*, Icrat latin.
- Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Nur Sayyid kristeva, Santoso. *Kapitalisme Negara dan masyarakat*.
- Low Brendan Gleeson, Nicolas. Politik hijau, kritik terhadap politik konvensional menuju politik berwawasan lingkungan dan keadilan.
- Rianto, Adi. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Sugiono 2012. Memahami penelitian kuantitatif. bandung: alfabeta.
- Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Sugiono. 2009. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta bandung .
- Sugiono. 2012. Memahami penelitian kuantitatif. Alfabeta bandung.
- Data BAPPEDA Paser Bidang Sosial Ekonomi, 2015
- Badan Statistik Kabupaten Paser Kalimantan timur tanggal, 23 april 2016

Dokumentasi peneliti, truck logging tgl 8 feb 2016

Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur 2015

Murat Arsel Jurnal *ekologi politik*, jurnal tanah air, (Internet). (Dikutip 18 april 2016).

Dokumentasi penelitian di Kecamatan, Muara Komam, Paser Belengkong tanggal, 02 maret 2016

Data hasil penelitian, dikabupaten paser, 2016

Nur Sayyid, Santoso. 2015. *kapitalisme Negara masyarakat*. Yogyakarta:pustaka pelajar.

Palmer, Tom g.. 2012. After the welfarwe state.washington.dc diakses pada 12 november 2015

UU Nomor 41 tentang Kehutanan Tahun 1999 diakses 17 November 2015

Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1. Diakses pada 12 november 2015.

Afandi, Oding. 2013 *Kebijakan alih fungsi hutan*.

[http://www.academia.edu/11998922/Kebijakan Alih Fungsi Hutan suatu Analisis Etika Lingkungan dan Kehutanan](http://www.academia.edu/11998922/Kebijakan_Alih_Fungsi_Hutan_suatu_Analisis_Etika_Lingkungan_dan_Kehutanan) diakses pada 7 november 2015
pkl 23.00

Pawito, 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pelangi Aksara. Yogyakarta.

Pompon, Wawancara, masyarakat Desa Laburan, pada tanggal 02 Januari 2016 pukul 13:00 WITA

Rusli, Yetti, Data Strategis Kehutanan 2008, Jakarta: Departemen Kehutanan, 2008.

Internet

Awang Farok, 2012, task force, Provinsi Kalimantan Timur, hasil pengelolaan hutan untuk menangani <http://www.gcftaskforce.org/documents/Kaltim%20-%20GCF%20Draft%20Booklet.pdf> diakses pada 7 november 2015.

Bambang paramudya. *efek pembukaan lahan terhadap karakteristik biofisik gambut pada perkebunan kelapa sawit di kabupaten bengkalis*. http://repository.uin-suska.ac.id/5129/1/2012_201210PTN.pdf. pada tgl 6 Nov., 15.

Diakses dari Bbc. bbc.com/indonesia/berita_indonesiasains_hutan diakses pada tanggal 04 oktober 2015, pada pukul 20.45.

Diunduh dari : <http://www.labsosiologiunj.org/wpcontent/uploads/2013/07/AHMAD-TARMIJI-A-EKOLOGI-POLITIK.pdf>. diakses pada tanggal 18 april 2016

Muhammad Utihal Huda. *Pengaruh Alih Fungsi Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap sifat kimia tanah*. Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara Medan 2008.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27385/4/Chapter%20I.pdf>. Diakses pada tanggal 6 november 2015

Marhadi Slamet Kistiyanto. *penelitian tentang pertanian menjadi perkebunan Kelapa sawit terhadap tingkat kesejahteraan petani kecamatan babulu kabupaten penajam paser utara Kalimantan timur*. <http://jurnalonline.um.ac.id/data/artikel/artikelF17F5FB6B64E2FA8AC869AB49C2986AA.pdf>. universitas negeri malang diakses pada 2015-11-06

JURNAL

Alkhudri AT. 2012. Ekologi Politik : *Body of knowledge*, sejarah pemikiran dan perkembangan empirik terkini. *Jurnal Komunitas*. (Internet). (dikutip 04 Nopember 2013). 6(2): 1-15.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan penelitian



DESA LABURAN KECAMATAN PASIR BELENGKONG

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kaharudin
Nip :
Jabatan : Kepala Desa Laburan

Dengan ini menerangkan dengan benar bahwa:

Nama : D. Maswara
Nim : 125120507111032
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Politik

Bahwa yang bersangkutan di atas adalah mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang yang telah melakukan Penelitian di Desa Laburan, Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 22 Desember 2015

KEPALA DESA



KAHARUDIN

Lampiran 2 : Surat Keterangan penelitian



DESA SUNGE BATU KECAMATAN PASIR BELENGKONG

SURAT KETERANGAN

Nomor: 30/2013/KD-SR/SR/11/2016 .

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Hordionto*
Nip :
Jabatan : Kepala Desa Sunge Batu

Dengan ini menerangkandengan benar bahwa:

Nama : D. Maswara
Nim : 125120507111032
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Politik

Bahwa yang bersangkutan di atas adalah mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang yang telah melakukan Penelitian di Desa sunge batu, Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 3 : Dokumentasi wawancara

Lampiran dokumentasi wawancara



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
 Jl. Veteran, Malang, 65145, Telp. : (0341) 575755 Psw. 108, Fax : (0341) 570038
<http://www.fisip.ub.ac.id>, E-mail: fisip@ub.ac.id

Nama : *Inggong*
 Usia : *63 tahun.*
 Alamat : *Desa Laburan Loma,*
 Pekerjaan : *Tani.*
 Hari & Tgl : *21 Maret 2016.*

1. Bagaimana dampak langsung dari alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit milik swasta, terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten paser, di desa laburan bagaimana ?
2. Apa saja peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan di desa laburan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat ?
3. Apa dampak yang terjadi akibat alih fungsi hutan yang berakibat kerusakan lingkungan dan berubahnya pola hidup masyarakat desa ?
4. Berapa luas wilayah desa ?
5. Berapa kepadatan jumlah penduduk ?
6. Berapa banyak jumlah keluarga di desa laburan ?
7. Mayoritas agama apa di desa ?
8. Bagaimana mata pencaharian penduduk di desa laburan setelah berubahnya sumberdaya alam menjadi perkebunan ?



Lampiran 4 : Dokumentasi wawancara

Lampiran dokumentasi wawancara



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
 Jl. Veteran, Malang, 65145, Telp. : (0341) 575755 Psw. 108, Fax : (0341) 570038
<http://www.fisip.ub.ac.id>, E-mail: fisip@ub.ac.id

Nama :

Usia :

Alamat :

Pekerjaan :

Hari & Tgl :

1. Bagaimana dampak langsung dari alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit milik swasta, terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten paser, di desa laburan bagaimana ?
2. Apa saja peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan didesa laburan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat ?
3. Apa dampak yang terjadi akibat alih fungsi hutan yang berakibat kerusakan lingkungan dan berubahnya pola hidup masyarakat desa ?
4. Berapa luas wilayah desa ?
5. Berapa kepadatan jumlah penduduk ?
6. Berapa banyak jumlah keluarga di desa laburan ?
7. Mayoritas agama apa di desa ?
8. Bagaimana mata pencaharian penduduk di desa laburan setelah berubahnya sumberdaya alam menjadi perkebunan ?

Kepala Desa Laburan

Kaharudin

Lampiran 5 : Dokumentasi Perjalanan Selama Penelitian



Lampiran 6 : Dokumentasi Dikantor Desa penelitian



Lampiran 7 : Dokumentasi Tokoh Masyarakat di Desa Pedalaman Penelitian



Lampiran 8 : Dokumentasi Foto Musium Desa Penelitian**Lampiran 9 : Jalan Rusak Menuju Desa pedalaman Desa Muara Komam**